



VOLUME XII / NO. 112 / JANUARI 2017

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

KALEIDOSKOP 2016



Daftar Isi



Foto Cover
lin Kurniati

5 DARI LAPANGAN
BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nutransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulistyio, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Muhammad Hijrah, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, lin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Dovan Wida Perwira, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

KALEIDOSKOP

- 14 Perekonomian Indonesia 2016
- 16 Ekonomi 2016: Bertumpu Pada Kekuatan Domestik
- 17 Amnesti Harga Mati
- 22 Merenungi Masa Depan Amnesti Pajak
- 24 APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi
- 28 Menuju Belanja Pemerintah Yang Berkualitas
- 29 Analisis APBN 2017, Lebih Kredibel?
- 30 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
- 33 Mengoptimalkan PPP Dalam Pembangunan Infrastruktur
- 34 Memerangi Aksi Penyelundup
- 36 Optimalisasi Pemberantasan Penyelundupan Nasional

- 37 Penyesuaian Cukai Rokok Tahun 2017
- 39 Cukai Tembakau, Benci Tapi Rindu
- 40 Kombinasi Antara Optimis dan Hati-Hati
- 43 Presiden Donald Trump dan Prospek Ekonomi Kita

WAWANCARA

- 44 APBN dan Rambu Pengelolaan Keuangan Negara

GENERASI EMAS

- 48 Tak Henti Hasilkan Temuan dan Prestasi

REGULASI

- 50 Akuntabilitas dalam Penatausahaan Barang Milik Negara

RENUNGAN

- 52 Kearifan untuk Memahami Sebuah Kesuksesan

BUKU

- 53 Catatan Najwa

JALAN-JALAN

- 54 Sianjur Mula Mula, Tanah Asal Suku Batak

SELEBRITI

- 56 Karier dan Musik Saling Mengisi



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Tidak Ikut amnesti pajak

ungkap . tebus . lega



Paling lama
3 Tahun

Terhitung sejak
Amnesti Pajak
mulai berlaku.

DJP
Mendapat
Data



Harta Wajib Pajak

yang diperoleh antara
1 Januari 1985 s.d.
31 Desember 2015

dan harta tersebut
Belum Dilaporkan dalam
SPT Pajak Penghasilan

dianggap
sebagai



**tambahan
penghasilan**

yang diperoleh Wajib Pajak
pada saat ditemukannya data
mengenai Harta tersebut.

&
kena

Pajak Penghasilan
dengan tarif normal



Segera manfaatkan
Amnesti Pajak dengan tarif murah
3% (s.d. 31 Desember 2016) atau
5% (1 Januari - 31 Maret 2017).

25%

WP
Badan

**5% s.d.
30%**

Orang
Pribadi



2%

sanksi
bunga

Dasar Hukum :
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4)
UU No.11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak



Info lebih lanjut :
www.pajak.go.id/amnestipajak



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Dari Lapangan Banteng

Hari Baru, Harapan Baru

Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba saja kita sudah menginjak tahun 2017. Mengawali tahun yang baru, sudah menjadi kebiasaan kami, Media Keuangan untuk menyajikan sebuah laporan utama berisi kilas balik peristiwa yang menjadi *highlite* di tahun sebelumnya. Terdapat beberapa topik ekonomi utama yang ramai dibicarakan di tahun 2016. Topik tersebut diantaranya amnesti pajak, APBN, perekonomian Indonesia, pembangunan infrastruktur, upaya pemberantasan penyelundupan, cukai rokok, serta topik *outlook* ekonomi yang muncul di akhir tahun.

Tahun 2016 diawali dengan situasi ekonomi yang masih rentan. Adanya perlambatan ekonomi Tiongkok dan rendahnya harga minyak memberikan pengaruh besar bagi ekonomi Indonesia. Walaupun demikian, di pertengahan

tahun, kembalinya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbukti menumbuhkan optimisme pasar.

Salah satu isu yang mendominasi pemeritaan di tahun 2016 yaitu amnesti pajak. Meskipun awalnya sempat terjadi pro dan kontra mengenai kebijakan ini, namun akhirnya semua pihak turut serta berperan juga untuk kesuksesan kebijakan ini. Menurut Presiden Jokowi, periode pertama amnesti pajak, 30 September lalu merupakan program *tax amnesty* paling sukses di dunia. Pemerintah berharap pemberlakuan kebijakan amnesti pajak dapat membantu pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan.

Topik lain yang tak henti dibahas oleh media, yaitu APBN. Pada APBN 2016, Pemerintah melaksanakan beberapa

langkah strategis, diantaranya penyesuaian target penerimaan negara, efisiensi belanja, dan penundaan Dana Alokasi Umum di beberapa daerah. Pemerintah menjaga APBN tetap kredibel, yaitu dengan penyesuaian di sisi belanja agar tetap menunjang prioritas pemerintah.

Sedangkan pada APBN 2017, fokusnya yaitu membangun perekonomian secara lebih kuat di tengah melemahnya perekonomian global. Pemerintah bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, serta memfokuskan belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan terwujud.

Akhir kata, mari sambut hari baru dengan semangat dan harapan yang baru. Selamat tahun baru.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Sepanjang tahun 2016, terdapat 5 isu besar Kemenkeu, yaitu amnesti pajak, APBN, cukai rokok, infrastruktur, dan perekonomian Indonesia. Yuk, sampaikan optimisme kamu di salah satu tema tersebut.
#OpiniAnda #SadarAPBN

Arie Purnomo Aji @ arie_purnomoaji

Hasil amnesti pajak bisa diinvestasikan di mana investasi menumbuhkan ekonomi dan lapangan kerja
#OpiniAnda #SadarAPBN

Lina Kie @ kiemiauthing

dana APBN dipakai utk memajukan dan membangun bangsa & negara indonesia supaya masyarakat dpt keluar dr kemiskinan

Dwi Puji Kusumastuti @ dwipuji27

dana tax amnesty membantu pemerintah dlm melaksanakan pembangunan negara dan menumbuhkan iklim yang baik dalam berinvestasi

tweet



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



Wanita Pemimpin Upacara

Finari Manan, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dari Direktorat Kepatuhan Internal menjadi komandan upacara pada apel luar biasa dalam peringatan Hari Anti Korupsi 2016 di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertindak sebagai pembina apel.

Foto:
Muchammad
Ardani



Terasiring yang Tak Asing

Argapura merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Daerah ini terkenal sebagai penghasil bawang daun, padi, ubi jalar, bawang merah, dan hasil pertanian lain khas kawasan dataran tinggi. Bagi para fotografer dan komunitas fotografi aktif, terasiring Argapura merupakan obyek favorit dan disebut sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.

Foto
Eddy Santoso





06/12 Sesjen Buka Orientasi 4.053 CPNS Kemenkeu 2016

Teks
Biro KLI

Foto
Khrisna Pandu

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto membuka kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2016 di Bogor, Selasa (06/12). Acara ini diikuti oleh 4.053 lulusan Program Diploma I dan II Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2016. Dalam *talkshow* yang dikemas secara informal, Sesjen menyampaikan bahwa acara orientasi ini adalah awal dari *induction* program, yang merupakan sarana mempersiapkan calon pegawai baru bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. "(Acara ini) sebagai salah satu acara yang sangat penting untuk pengenalan pertama serta penanaman perilaku-perilaku dan sikap mulia yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan Pemerintahan," jelasnya.



Presiden Serahkan DIPA di Istana Negara

Presiden Jokowi melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (07/12). Acara penyerahan DIPA ini dihadiri oleh ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan pimpinan lembaga, gubernur, bupati, serta walikota. DIPA tersebut diserahkan kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L), dengan total nilai mencapai Rp763,6 triliun. Selain itu, Presiden juga menyerahkan DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,3 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun.

07/12

Teks
Biro KLI

Foto
Langgeng Wahyu

10/12

Teks
Biro KLI

Foto
Anas N.H.

Kemenkeu Raih Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Kementerian dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan ini diberikan saat Festival Anti Korupsi (HAKI) 2016 yang berlangsung di Pekanbaru pada 9 Desember 2016.



19/12 Presiden Luncurkan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016

Teks
Biro KLI

Foto
Anas N. H.

Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Uang Rupiah Desain Baru Tahun Emisi 2016. Uang Rupiah tersebut baru saja diluncurkan pada hari pada Senin (19/12). Terdapat 12 wajah pahlawan yang ditampilkan pada desain baru uang Rupiah. Dalam sambutannya, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai mata uang Rupiah sebagai perwujudan cinta pada negeri. "Mencintai Rupiah adalah salah satu wujud kecintaan kita pada kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia," kata Presiden.



Kemenkeu Raih Predikat WBK dan WBBM dari KemenPAN-RB

10/12

Teks
Biro KLI

Foto
Anas N. H.

Tiga unit kerja pelayanan Kemenkeu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 1 (satu) unit kerja pelayanan Kementerian Keuangan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan Festival Antikorupsi 2016 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) 2016 yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau. Ketiga unit kerja Kemenkeu yang meraih predikat WBK adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan, Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Untuk kemudian unit kerja Kemenkeu yang meraih predikat WBBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura.

10/12

Teks
Biro KLI

Foto
Anas N. H.

Kemenkeu Raih Booth Terbaik Pertama pada Festival Antikorupsi 2016

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai 'Booth Terbaik I' dalam kegiatan Integrity Expo (Pameran Tunjuk Integritas). Penghargaan ini diberikan pada acara Festival Antikorupsi 2016 yang berlangsung di Pekanbaru pada Sabtu malam (10/12). Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Festival Antikorupsi 2016 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Internasional (HAKI) yang jatuh setiap 9 Desember. Kota Pekanbaru tahun ini menjadi tuan rumah dengan rangkaian acara yang dilaksanakan selama tiga hari pada 8-10 Desember 2016.



Januari

06 | Peluncuran Website Government Financial Statistic (GFS). Berisi laporan keuangan konsolidasi pusat dan daerah.

Februari

10 | Peresmian KPPN Khusus Penerimaan dan Investasi bagi stakeholders khusus di luar Kementerian/Lembaga (pengguna anggaran).

12 | Peluncuran Zona Bebas Tunai (cashless zone) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menyukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) sebagai program nasional Kemenkeu bersama Bank Indonesia.

Mei

09 | Penyerahan Tanggapan Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP 2015 oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro di kantor pusat BPK.

16 | Pembukaan Sidang Islamic Development Bank (IDB) ke-41 oleh Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro dan Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Mohamed Ali Al Madani di Jakarta Convention Center. Indonesia sebagai tuan rumah acara IDB ke-41.

April

01 | Penerbitan sukuk negara dalam valuta asing atau Sukuk Global dalam dual-tranche oleh pemerintah untuk pertama kalinya.

08 | Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendalaman Pasar Keuangan antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maret

01 | Pelantikan Direktur Jenderal Pajak baru, Ken Dwiujugasteadi, oleh Menkeu Bambang Brodjonegoro.

10 | Peresmian 11 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang digagas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai oleh Presiden Jokowi.

22 | Peresmian Gedung Dwi Warna Bandung menjadi Museum Perbendaharaan.

30 | Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

01 | Pencanangan Program Pengampunan Pajak secara resmi oleh Presiden Jokowi di kantor pusat DJP pasca disahkannya UU Pengampunan Pajak.

18 | Kesepakatan Asumsi Makro RAPBN 2017 antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

29 | Peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Mencakup 10 indikator kemudahan berusaha (ease of doing business), khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Kilas Peristiwa 2016

Tahun baru kembali menyapa dan memberikan harapan baru. Serangkaian upaya sepanjang tahun 2016 lalu bisa menjadi dasar pijakan untuk melangkah ke tahun berikutnya. Kementerian Keuangan melalui sejumlah kebijakan, inovasi, dan kegiatan di bidang fiskal turut membangun keuangan dan perekonomian Indonesia sehingga bisa lebih baik dari tahun ke tahun.

Juli

27 | Pelantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Jokowi menggantikan Bambang Brodjonegoro yang dialihutugaskan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Agustus

02 | Indonesia menjadi tuan rumah Pelaksanaan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 di Jakarta Convention Center.

09 | Launcing LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebagai operator DJKN dalam pengelolaan BMN untuk memaksimalkan penerimaan negara.

24 | Peluncuran Paket Kebijakan Jilid XIII yang mencakup penyederhanaan regulasi dan pajak bagi pengembangan kawasan perumahan demi percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

September

07 | Kesepakatan Menkeu dengan DPR terkait asumsi makro RAPBN 2017 sebagai dasar penyusunan APBN 2017.

14 | Peresmian Portal Data APBN sebagai salah satu dukungan agenda transparansi fiskal internasional.

15 | Penyampaian RUU APBN 2017 beserta Nota Keuangan ke DPR.

30 | Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai 2017 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Oktober

01 | Penetapan Hari Bea Cukai Indonesia oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

04-09 | Pertemuan World Bank-IMF Annual Meetings 2016 di Washington DC. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menjadi pembicara dalam seminar bertema "Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality".

10 | Peluncuran Paket Kebijakan Jilid XIV yang memaparkan roadmap dan kebijakan di bidang perdagangan elektronik (e-commerce).

18 | Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Presiden Jokowi di Istana Negara sebagai hasil koordinasi antara Bank Indonesia (BI), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

02 | Indonesia keluar sementara dari keanggotaan OPEC untuk menghindari kenaikan harga minyak yang berpotensi merugikan Indonesia.

05 | Penyelenggaraan pertemuan ke-13 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan Indonesia sebagai tuan rumah guna mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

25 | Penandatanganan Perjanjian Pertukaran Data, Letter of Intent (LoI) on Establishing the Exchange of Information on Risk Management, antara Bea Cukai RI dengan Belanda.

November

07 | Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2017 di Istana Negara oleh Presiden Jokowi.

08-09 | Penyelenggaraan Forum Internasional tentang pembangunan ekonomi dan kebijakan publik bertajuk "Unlocking Public and Private Investment: Role of Financial Sector" oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Bali.

Desember

Perekonomian Indonesia 2016

Mengawali 2016, perekonomian Indonesia menghadapi situasi yang masih rentan. Perlambatan ekonomi global paska krisis tahun 2008 belum benar-benar pulih. Pengaruh terbesar bagi Indonesia di tahun ini adalah perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih rendahnya harga minyak.

Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok menekan kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, harga minyak menjadi referensi harga bagi komoditas lain sehingga anjloknya harga minyak berimbas pada harga komoditas yang rendah. Di sisi lain, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 mencapai 4,92 persen, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen. Namun, kepala BPS, Suryamin mengatakan penurunan ini wajar. "Pada triwulan I, biasanya kegiatan-kegiatan ekonomi baru dimulai," katanya.

Pada triwulan kedua, ekonomi tumbuh 5,18 persen, meningkat dibanding triwulan II-2015. Menurut Suryamin, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan tersebut.

"Pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat terutama pada kelompok hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga," katanya.

Memasuki triwulan ke III pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen, sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya. Artinya, secara kumulatif sampai triwulan III 2016 ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen. Adapun target yang dipatok dalam APBN-P 2016 adalah 5,2 persen yang dikejar pada triwulan berikutnya melalui akselerasi belanja.

Pergantian Menteri Keuangan

Pada pertengahan tahun (27/07), Presiden Joko Widodo menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro yang menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menkeu pada periode 2005-2010 sebelum menjalankan tugas

sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Kembalinya Sri Mulyani menuai reaksi positif dari pasar. Hal ini tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah yang menguat terhadap dollar Amerika Serikat. "Saya merasa terhormat diminta kembali oleh Presiden untuk bekerja sama dengan menteri kabinet yang lain untuk menjalankan sisa masa kabinet ini. Semoga itu bisa dicapai," ucapnya kala itu.

Dalam pekan pertama bertugas, Menkeu mengajukan proposal penyesuaian anggaran, baik di pusat maupun transfer daerah. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk menjaga momentum pergerakan ekonomi, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Sebelumnya, pada APBN-P 2016 anggaran Kementerian/Lembaga dikurangi Rp50 triliun. Kali ini pengurangannya lebih besar. Hingga Rp133 triliun. "Langkah-langkahnya adalah mengurangi belanja Rp 65 triliun di K/L



Ilustrasi
Wardah Adina

global. Dengan pemangkasan peraturan dan pemberian kemudahan izin usaha dan investasi, ekonomi Indonesia akan tetap tangguh.

Untuk memastikan keseluruhan paket benar-benar dilaksanakan, akhir Mei 2016 pemerintah membentuk empat kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja kampanye dan diseminasi kebijakan. Kedua, Pokja percepatan dan penuntasan regulasi. Ketiga, Pokja evaluasi dan analisis dampak. Keempat, Pokja penanganan dan penyelesaian kasus. Presiden Jokowi menginstruksikan agar seluruh program prioritas termasuk paket kebijakan terus dikawal. "Baik dengan turun ke lapangan, cek langsung, dan juga untuk melihat dari sisi perjalanan prosedurnya," kata Jokowi.

Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mengungkapkan pemerintah masih terus melakukan pengujian di lapangan agar regulasi-regulasi yang ada memberi kenyamanan, baik untuk para investor maupun UMKM. "Meski implementasi paket kebijakan sudah berjalan, kita akan lakukan perbaikan kalau ada *complain* dari dunia usaha," katanya. Teten menambahkan, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur. "Supaya bisa menarik investasi di dalam negeri, infrastruktur harus kita bangun lebih dulu," pungkas Teten.

serta transfer daerah Rp68,8 triliun," tutur Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menguraikan, pengurangan anggaran K/L ditujukan untuk aktivitas yang dianggap tidak betul-betul menunjang sasaran prioritas pemerintah. Misalnya saja belanja perjalanan dinas dan konsinyering. Sementara itu, pengurangan anggaran transfer ke daerah dilakukan karena penerimaan pajak tahun ini diperkirakan lebih kecil. Dengan demikian penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah pun otomatis akan dikurangi.

Paket Kebijakan Ekonomi

Demi menjaga ekonomi Indonesia dari risiko domestik maupun internasional, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan proaktif, termasuk kebijakan moneter yang hati-hati, menambah investasi infrastruktur, dan reformasi kebijakan untuk memperkuat iklim investasi.

Sejak September 2015 hingga saat ini, terdapat 14 paket kebijakan ekonomi. Melalui deregulasi, debirokratisasi dan insentif fiskal, pemerintah berharap fundamental ekonomi nasional semakin kuat sehingga mampu bertahan dari besarnya tekanan ekonomi



Ekonomi 2016: Bertumpu Pada Kekuatan Domestik

Teks Masyita Crystallin*)

Manajemen perekonomian memiliki dua sisi yang saling terkait. Pertama, kebijakan jangka pendek yang mempengaruhi permintaan agregat. Kedua, kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan *output* potensial dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kebijakan jangka pendek diperlukan untuk meredam volatilitas perekonomian dan memberi stimulus saat ekonomi sedang lemah. Sementara, kebijakan jangka panjang diperlukan untuk meningkatkan potensi perekonomian Indonesia untuk dapat lepas dari *middle income trap* dan menjadi negara maju.

Di tahun 2016, Indonesia berhasil menyeimbangkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dengan anggaran yang berkualitas dan kredibel, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pemulihan pertumbuhan ekonomi tidak dapat tergantung pada perekonomian global saja. Apalagi, perekonomian dunia belum pulih.

Dana Moneter International pada bulan Oktober 2016 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 3,2 persen di tahun 2015 menjadi hanya 3,1 persen di 2016, jauh lebih lemah dari perkiraan di bulan Oktober 2015 sebesar 3,6 persen. Selain itu, harga komoditas diperkirakan akan tetap lemah.

Perdagangan global tumbuh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2005-2015, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi global menghasilkan 1,5 persen perdagangan. Angka ini jauh dibawah rerata elastisitas tahun 1990-2000 yang sebesar 2,8 persen.

Andalkan kekuatan ekonomi domestik

Sebagai konsekuensinya, pemulihan pertumbuhan harus lebih mengandalkan kekuatan domestik yaitu konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sudah mulai meningkat dibandingkan tahun 2015, mencapai rata-rata 5,04 persen di tiga kuartal pertama 2016. Hal ini didukung oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi swasta yang relatif stabil. Di sisi lain, investasi swasta belum menunjukkan geliatnya.

Pengeluaran pemerintah telah berhasil menjadi motor pertumbuhan ekonomi saat permintaan agregat sedang lemah, terutama di paruh pertama 2016. Pemangkasan anggaran pada kuartal ketiga diperlukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan *shortfall* penerimaan sebesar lebih dari Rp219 triliun, jika dibandingkan dengan APBNP 2016. Meskipun stimulus fiskal masih diperlukan mengingat lemahnya denyut perekonomian, akan tetapi kredibilitas anggaran juga penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Sayangnya, investasi swasta masih sangat terbatas, tumbuh sebesar 4,1 persen di kuartal ketiga, jauh dibawah rerata di paruh pertama 2016, sebesar 5,3 persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat dan faktor-faktor struktural seperti kemudahan mengurus perijinan, akses keuangan dan aspek kemudahan berusaha lainnya. Survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia menunjukkan kegiatan yang melambat di kuartal ketiga. Diperkirakan, perlambatan masih akan terjadi di kuartal keempat dengan penurunan kegiatan hampir di semua sektor.

Seimbangkan target pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas jangka pendek

Di saat ekonomi global dan domestik sedang lesu, pemerintah berusaha menyeimbangkan antara manajemen volatilitas ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Fokusnya adalah pada peningkatan produktivitas dan daya saing. Langkah pemerintah untuk mempertahankan investasi infrastuktur ditengah pemotongan anggaran merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan jangka panjang.

The devil is in the detail: yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan proyek-proyek prioritas berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Amnesti Harga Mati

Amnesti pajak telah dinyatakan tidak melanggar ketentuan. Kini tak perlu ada lagi keraguan. Dengan kepastian, tibalah rakyat berperan untuk pembangunan.

Detik demi detik, *dashboard* statistik amnesti pajak dalam laman pajak.go.id menunjukkan pergerakan. Tercatat lebih dari 509 ribu wajib pajak memanfaatkan program yang telah dijalani pemerintah sejak pertengahan tahun lalu. Tak kurang dari Rp4.037 triliun harta kekayaan wajib pajak sudah dideklarasikan serta Rp101 trilion penerimaan negara dihasilkan hingga awal pekan keempat Desember 2016 (19/12).

Meski pemerintah menargetkan dapat mengantongi Rp165 triliun untuk penerimaan negara hingga 31 Maret 2017, tetapi sebenarnya penambahan basis pajak potensial lebih utama. Melalui peningkatan basis pajak baru dan perbaikan administrasi pajak, maka postur APBN ke depan dinilai akan lebih *suinustainable*. Dengan demikian diharapkan kemampuan belanja pemerintah lebih besar sehingga otomatis mendorong pembangunan infrastruktur dan masyarakat.

Data basis pajak ini diperoleh berdasarkan deklarasi harta yang dilaporkan Wajib Pajak (WP). Tercatat, nilai deklarasi harta dalam negeri mencapai Rp2.907 triliun, dan nilai deklarasi harta luar negeri sebesar Rp990 triliun. Sisanya, sejumlah Rp141 triliun merupakan harta dari luar negeri yang dibawa kembali ke tanah air (repatriasi). Sementara realisasi penerimaan terdiri atas pembayaran tebusan sebesar Rp97,3 triliun, pembayaran tunggakan sebesar Rp3,06 triliun, dan pembayaran bukti permulaan sebesar Rp639 miliar.

Dana hasil repatriasi modal dan aset dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas ekonomi. Dana itu nantinya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan sehingga manfaatnya akan terasa terhadap nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan likuiditas perbankan.

Bila menilik ke belakang, saat berakhirnya program amnesti

pajak periode pertama 30 September lalu, sekitar 405 ribu wajib pajak mendeklarasikan harta kekayaannya. Sebanyak Rp3.322 triliun harta dideklarasikan dengan menghasilkan total penerimaan sebesar Rp97 triliun. Menurut Presiden Jokowi, periode pertama merupakan program *tax amnesty* paling sukses di dunia.

“Pada periode pertama saja sudah 30,88 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita, (negara) yang lain-lain di bawah 10 (persen) semua. Ini sebuah angka yang besar,” jelas Presiden saat membuka Sosialisasi Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Senin (05/12).

Untuk mendorong keberhasilan program ini pada periode kedua dan ketiga, setidaknya ada empat strategi yang disiapkan pemerintah. Pertama, pemerintah akan tetap fokus pada WP *prominent*, atau lebih familiar dengan sebutan WP potensial, baik yang berpengaruh di tingkat regional maupun berpengaruh secara nasional.

Langkah ini dilakukan Presiden Jokowi dengan mengundang sekitar 500 WP ke istana negara Sabtu beberapa waktu lalu, (10/12). Dalam pertemuan itu,



Presiden melakukan sosialisasi amnesti pajak pada WP yang merupakan kategori *prominent* atau masuk dalam *list* orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes dan Globe Asia tahun 2015.

Kedua, pemerintah akan menganalisa WP bukan *prominent* terutama mendata kepemilikan harta yang nantinya disandingkan dengan data Surat Pemberitahuan Pajak tahunan mereka. Harta tersebut dapat berupa kepemilikan aset, kepemilikan kendaraan bermotor, kapal, properti, saham, obligasi, dan lainnya.

Ketiga, pemerintah akan fokus menyasar para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah melakukan upaya persuasi dengan memanfaatkan data kontak terverifikasi seperti penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan kriteria tertentu. Amnesti pajak kepada wajib pajak UMKM ini tidak semata-mata dilakukan untuk mendapat uang tebusan, tetapi juga ditujukan untuk mendorong UMKM berpindah dari sektor informal ke sektor formal.

Keempat, pemerintah melakukan pendekatan melalui asosiasi profesi, didukung oleh data eksternal dan internal. Terbukti, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan sejumlah pertemuan dengan para CEO perusahaan, asosiasi pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, asosiasi perbankan, tenaga medis serta sejumlah asosiasi profesi lainnya.

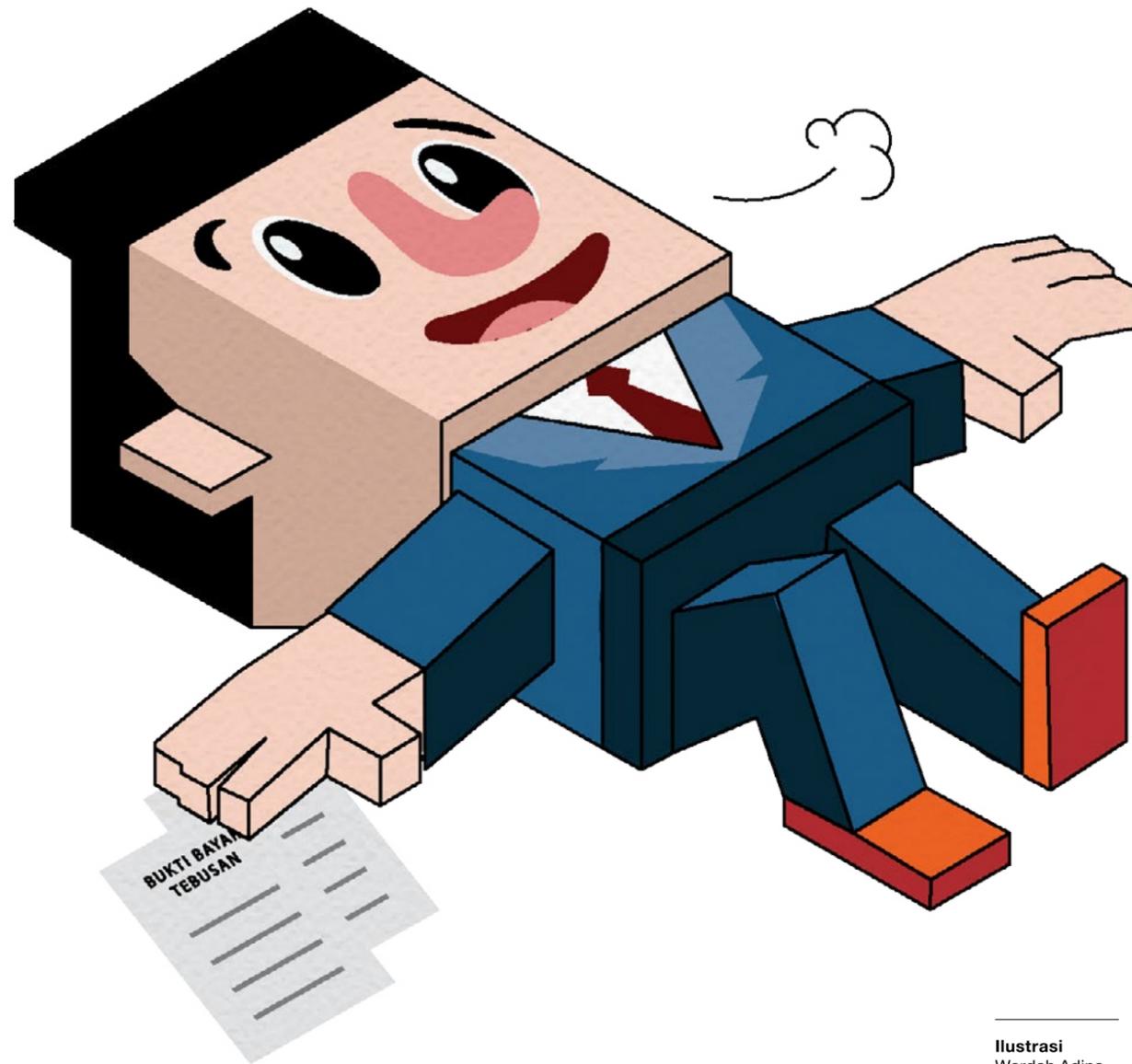
Dalam Seminar dan Ulang Tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Jakarta, Jumat (09/12) lalu, Menkeu mengajak para pelaku usaha dan asosiasi profesi untuk berkontribusi pada negara. “Sebagai Menkeu saya tidak meminta jiwa raga Anda, saya meminta Anda membayar pajak,” tegasnya. Menkeu juga mengajak

para komisaris dan direksi perbankan untuk segera menggunakan haknya mengikuti amnesti pajak.

Adapun tarif tebusan untuk periode kedua bulan Oktober sampai Desember bagi WP yang melaporkan harta di dalam

negeri atau merepatriasi harta yang ada di luar negeri, hanya dikenai tarif 3 persen. Bagi WP yang mendeklarasikan harta di luar negeri, dikenai tarif 6 persen.

Sementara itu, bagi wajib pajak UMKM dengan omzet sampai dengan Rp



Ilustrasi
Wardah Adina

4,8 miliar setahun memiliki dua kategori tarif tebusan. Bila wajib pajak UMKM melaporkan harta tidak lebih dari Rp 10 miliar maka tarif tebusannya sebesar 0,5 persen. Selanjutnya bila wajib pajak UMKM melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar maka berlaku tarif sebesar 2 persen.

Menkeu menegaskan, akan ada sanksi bagi WP yang tidak mengikuti amnesti pajak jika di kemudian hari terbukti memiliki harta yang belum dilaporkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap WP yang tidak mengikuti amnesti pajak dan ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan, maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima/diperoleh wajib pajak.

Atas tambahan penghasilan itu, maka WP akan dikenai pajak penghasilan (PPh) dengan tarif normal. Adapun besarnya, yakni sebesar 25 persen untuk WP badan serta sebesar 5 hingga 30 persen untuk WP orang pribadi. Sanksi ini ditambah pula dengan pengenaan sanksi administrasi bunga sebesar 2 persen per bulan (paling lama 24 bulan).

Dalam perjalanannya, program amnesti pajak tak selalu berjalan mulus. Terbukti, beberapa elemen masyarakat, baik perseorangan maupun lembaga swadaya masyarakat mengajukan *judicial review* (uji materiil) atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak. Setidaknya, terdapat 11 pasal yang diajukan untuk diuji materiilnya ke Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, dari beberapa kali persidangan *judicial review*, akhirnya pada Rabu, 14 Desember 2016 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Amnesti Pajak tidak melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto menyatakan bahwa pengajuan *judicial review* merupakan ujian besar

bagi pemerintah dan DPR untuk memastikan UU itu tidak bertentangan secara konstitusi dan memenuhi aspek legalitas, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Melalui keputusan ini diharapkan hasil amnesti pajak akan lebih baik lagi seiring masyarakat semakin nyaman untuk ikut serta. “Justri ini (Keputusan MK) akan memperkuat pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat ikut *tax amnesty*. Masyarakat tidak perlu ragu lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga pelaksanaan *tax amnesty* yang jauh lebih baik lagi,” kata Hadiyanto selepas Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (15/12) seperti dikutip dari laman Kemenkeu.go.id.

Kilas balik

Februari lalu, dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central G20 yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pemerintah Indonesia dengan tegas meminta komitmen global agar keterbukaan informasi secara internasional segera dilaksanakan. Dua tahun lagi (2018), seluruh negara-negara anggota G20 diharapkan sepakat untuk mengadaptasi pertukaran data perpajakan dan transaksi keuangan secara otomatis (*automatic exchange system of information*).

Kebijakan ini memungkinkan pembagian data perbankan serta data pajak antarnegara. Kebijakan ini juga disinyalir mampu mendeteksi ‘wajib pajak nakal’ yang menyembunyikan aset di luar negeri. Hasil akhirnya diharapkan agar ‘dana parkir’ di luar negeri dapat digunakan sebagai salah satu basis penerimaan negara.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna mendukung keterbukaan informasi internasional serta mewujudkan penegakan pajak di tahun 2016 yakni menerapkan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Kebijakan ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga ditujukan untuk memperluas basis pajak melalui deklarasi, repatriasi hingga kewajiban pembayaran tunggakan pajak.

Dengan berlakunya sistem pertukaran informasi nantinya, jika ditemukan ketidakpatuhan pelaporan aset dan pembayaran pajak, maka pada 2018 para wajib pajak tidak akan mendapatkan pengampunan seperti saat ini. Melalui pemberlakuan amnesti pajak maka diharapkan dapat membantu pembangunan infrastruktur, meningkatkan perekonomian, mengurangi

“Saya sendiri yang jawab. Saya buka sampai jam 4 pagi. Mungkin yang perlu digaris bawahhi kenapa kita melakukan ini, kami sudah habis-habisan untuk amnesti pajak. Amnesti harga mati.”

Ken Dwijugasteadi
Direktur Jenderal Pajak

pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan.

Selama ini, pemerintah sulit membuka data perbankan wajib pajak karena terganjal UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam aturan tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tergolong sebagai rahasia bank.

Sementara tahun ini, pemerintah menetapkan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peraturan hukum yang lebih tinggi bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian yang lebih besar sebagai produk bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Berkaca dengan kebijakan serupa yang pernah dilaksanakan tahun 1964, 1984, serta kebijakan *sunset policy* tahun 2008, pelaksanaan amnesti pajak tahun 2016 dapat dikatakan lebih signifikan perbedaannya. Disisi payung hukum, pengampunan pajak pada era sebelumnya hanya berlandaskan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.

Kebijakan pengampunan pajak tahun 1964 dan 1984 juga dinilai tidak berhasil lantaran sistem administrasi perpajakan pada masa itu belum memadai dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pada masyarakat. Selain itu, pada saat itu ketergantungan pemerintah pada penerimaan pajak juga tergolong masih rendah.

Selanjutnya ketika *sunset policy* diberlakukan tahun 2008, ternyata

kebijakan tersebut hanya menghapuskan sanksi denda administrasi, sementara pokok pajaknya tetap wajib dibayar secara penuh. Kala itu juga tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak.

Amnesti pajak yang diberlakukan mulai tahun ini memberi keringanan tarif dan penghapusan sanksi pelanggaran pajak. Keringanan ini berupa penerapan tarif yang lebih rendah dibanding tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Pemerintah juga memberikan pembebasan atas tuntutan pidana pajak.

Dengan kata lain, seluruh pajak terutang termasuk di dalamnya sanksi administratif dan pidana pajak sebelum 31 Desember 2015 dapat dihapus melalui amnesti pajak. Setiap WP orang pribadi, badan, pengusaha omset tertentu, yang sudah maupun belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berhak mengikuti amnesti pajak.

Namun demikian, terdapat pengecualian amnesti pajak untuk WP tertentu. Pengecualian tersebut ditujukan untuk: 1) WP yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; 2) WP dalam proses peradilan; dan 3) WP yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut Bambang Brodjonegoro, mantan Menkeu yang kini menjabat sebagai Kepala Bappenas, kondisi politik kala itu berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Urgensi pelaksanaan amnesti pajak tahun ini, lanjut Bambang, bukan hanya terkait kepentingan pemerintah, tetapi kepentingan pembayar pajak. Nantinya saat keterbukaan informasi internasional berlaku, maka tidak ada tempat untuk menyembunyikan hartanya.

“*Tax amnesty* (dulu) tidak selesai seutuhnya. Saat itu Indonesia baru mulai reformasi (sistem adminsitras) sektor perpajakan. 2018 nanti sudah terbuka, mau tidak mau semua orang harus melaporkan hartanya. Kita tidak perlu amnesti lagi untuk mendapatkan data. Kebetulan negara-negara lain sudah banyak yang melakukan (*tax amnesty*), tentunya kita akan meniru yang berhasil, tapi saya tekankan di Indonesia ini yang terakhir,” kata Bambang saat ditemui Media Keuangan Februari lalu.

Disamping itu, Presiden dalam Pencangan Program Pengampunan Pajak di JIExpo Jakarta, Senin (1/8) menegaskan

bahwa program ini bukan upaya pengampunan bagi para koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang. Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah hanya menysasar para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara *tax heaven* untuk membawa kembali kekayaannya ke tanah air.

Mendukung arahan Presiden, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan bahkan melakukan ‘jemput bola’ dengan sosialisasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Sosialisasi ini dilakukan disela-sela acara Indonesia Business Outlook yang diselenggarakan oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) di Ritz Carlton Milenia, Singapura, Kamis (11/8).

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, dalam setiap kesempatan sosialisasi selalu mengajak para wajib pajak untuk tidak ragu mengikuti program yang memiliki slogan *Ungkap, Tebus, Lega*. Dimata Sri Mulyani, sikap patuh pajak merupakan wujud sikap cinta terhadap negeri. “Bayarlah pajak karena itu bentuk kecintaan yang nyata pada Republik,” ujarnya.

Selain sosialisasi di dalam dan luar negeri, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyiapkan sejumlah layanan informasi. Diantaranya seperti *tax amnesty service* 1500745, *helpdesk* amnesti pajak yang tersebar pada sekitar 588 titik di seluruh tanah air dan beberapa negara, serta melakukan publikasi informasi di *website* dan sosial media.

Direktur Jenderal Pajak, Ken

Dwijugasteadi juga menyiapkan aplikasi pengiriman pesan instan (*WhatsApp*) resmi melalui 0813-10503747. “Saya sendiri yang jawab. Saya buka sampai jam 4 pagi. Mungkin yang perlu digaris bawahhi kenapa kita melakukan ini, kami sudah habis-habisan untuk amnesti pajak. Amnesti harga mati.”

Dukungan

Kebijakan amnesti pajak mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Nury Effendi memandang bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menaruh modal di Indonesia ditengah ketidakpastian ekonomi global. “Indonesia *looks promising* sekarang ini. Efek jangka panjangnya akan lebih terasa terhadap ekonomi jika dana yang masuk ke pasar uang dan pasar modal bisa tembus ke sektor riil,” lanjutnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad menyatakan kesiapan jajarannya untuk mensukseskan amnesti pajak. “Peran OJK lebih banyak pada persiapan menerima dana repatriasi. Repatriasi ini kita harapkan bisa memperbaiki, bisa memperdalam industri Keuangan nasional. Dana yang masuk bisa kita gunakan untuk keperluan yang lebih produktif,” ujarnya.

Disisi perbankan, semangat optimis juga terasa dari Direktur Bank Negara Indonesia, Achmad Baiquni. Sebagai salah satu *gateway*, pihaknya optimis mampu

menampung dana repatriasi yang tidak sedikit jumlahnya. “Saya menargetkan paling tidak (dapat) sekitar 60-70 triliun dari dana repatriasi karena kita menghitung jumlah WP yang tergolong dari nasabah besar, menengah, dan kecil,” ungkapnya.

Baiquni juga menekankan pentingnya pemerintah menciptakan produk atau proyek investasi yang membuat WP tertarik untuk menginvestasikan hartanya di Indonesia. Ia yakin masih cukup banyak proyek infrastruktur maupun non-infrastruktur yang membutuhkan pendanaan.

Sofjan Wanandi, Staf Khusus Wakil Presiden yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa amnesti pajak sebenarnya memberi banyak kelebihan. Apalagi ekonomi global masih lesu sehingga tidak banyak investasi di luar negeri yang menguntungkan.

Sofyan mencontohkan, kini Jepang menerapkan suku bunga negatif. Artinya para investor justru harus membayar dana yang diutangkan. Sementara di Amerika dan Singapura bunga yang didapatkan hanya sekitar 1-2 persen. Indonesia sendiri masih memberikan bunga 4-5 persen untuk obligasi dollar dan 7-8 persen untuk obligasi rupiah. “Sekarang cari untung di Indonesia sajalah. Sebelum ada amnesti, Anda akan dikenakan pajak 30 persen. Tetapi sekarang Anda cukup bayar 2-4 persen. Kenapa *enggak* kita manfaatkan itu?”, paparnya.

Teks lin Kurniati



Merenungi Masa Depan Amnesti Pajak

Teks Candra Fajri Ananda*)

Berkerat terselenggaranya program pengampunan pajak (*tax amnesty*), tahun ini kita mencatat histori hebat dalam sejarah perekonomian Indonesia. Program ini terhitung sangat langka karena tidak akan terjadi pada setiap tahun bahkan tidak semua negara mampu menyelenggarakannya. Kita patut bersyukur bahwa meskipun secara *de jure* periode pelaksanaannya belum berakhir, Indonesia mampu menorehkan rekor-rekor penghasilan yang sulit ditandingi negara manapun yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

Pro-kontra opini memang sulit dihindari dengan citra kebijakan *tax amnesty* yang lebih banyak dikonotasikan secara negatif. Beberapa pihak sempat mengajukan *judicial review* agar program ini dibatalkan tetapi pemerintah dapat dianggap sebagai “pemenang” karena pada kenyataannya kebijakan ini tetap resmi berjalan. Sekarang sudah bukan lagi momentum untuk terus melanjutkan perdebatan, karena suka ataupun tidak suka, *the show must go on*.

Wacana pelaksanaan kebijakan amnesti pajak menjadi begitu kuat lantaran penerimaan negara kini dalam kondisi yang lemah. Apalagi pemerintah berambisi untuk mengakselerasi pembangunan. Dengan penerimaan yang terbatas, pemerintah tidak memiliki pilihan kebijakan selain melakukan ekspansi pajak, atau meningkatkan utang untuk menambal defisit anggaran.

Tradisi sistem keuangan negara kita memang “menghalalkan” kebijakan utang bilateral atau ke sektor swasta dengan batas rasio maksimal 60% terhadap total PDB di Indonesia. Sementara itu, Kemenkeu (2016) mencatat rasio utang kita hingga awal Desember kemarin masih di kisaran 28% *persen*, artinya peluang untuk menambah jumlah utang dapat dikatakan masih terasa sangat longgar. Sayangnya, kebijakan itu bisa memiliki interpretasi yang berbeda jika ditinjau dari sudut pandang politik karena dinilai dapat lebih berbahaya ketimbang berekspansi melalui program pengampunan pajak.

Memasuki periode kedua dari total tiga periode yang direncanakan, banyak hal yang menarik seputar pelaksanaan program pengampunan pajak. Dimulai dari kita harus mengapresiasi kinerja pemerintah terutama Presiden, Menteri Keuangan, dan Ditjen Pajak yang menjadi ujung tombak terlahirnya rekor-rekor fantastis. Pada triwulan pertama, sejak Juli hingga September 2016, kita mampu menghasilkan dana tebusan mencapai Rp97,2 triliun, melampaui rekor dunia sebelumnya yang dikuasai Italia sejak 2009 silam.

Dana tebusan yang diterima pada periode yang sama jika dirasioikan terhadap total PDB mencapai 0,77%, mengungguli rekor Negara Cile tahun 2015 yang mencapai 0,62%. Rasio penyertaan harta yang dihasilkan dari deklarasi harta dan program repatriasi (menarik kekayaan WNI dari luar negeri) juga tidak kalah

mentereng. Capaian kita telah menembus kisaran rasio 20% terhadap PDB, jauh mengungguli Italia yang mengumpulkan sedikit di atas 10%. Daftar perolehan tersebut masih dapat terus berkembang seiring masa berlakunya baru akan ditutup pada 31 Maret 2017.

Prestasi ini tentu tidak dilalui dengan instan. Berbagai drama sudah menghiasi sejak wacana program ini digulirkan, seperti baru beberapa hari dijalankan, terjadi *reshuffle* Menteri Keuangan. Presiden Joko Widodo memilih “merepatriasi” Sri Mulyani untuk memperkuat daya tawar pemerintah terhadap para *taxpayer* apalagi pemerintah menetapkan target tinggi untuk mendapatkan dana repatriasi. Kita sulit menampik bahwa totalitas dari pemerintah mampu merombak ekspektasi publik yang sempat dilanda pesimisme yang kuat. Hasil dana tebusan *tax amnesty* dianggap ikut meredam polemik serius akibat kebijakan pemotongan anggaran belanja pemerintah yang sempat terjadi pada kuartal III 2016 lalu. Faktor *trust* yang berhasil dibangun antara pemerintah dengan dunia usaha dan wajib pajak menjadi *success story* yang layak dipertahankan.

Beberapa bulan ke depan, pemerintah dituntut untuk memenuhi target akhir dana tebusan yang diharapkan dapat terkumpul hingga Rp165 triliun. Bila data dalam *dashboard* amnesti pajak (2016) kita intip sejenak, pemerintah untuk saat ini boleh dibalang merasa cukup tegang karena sepanjang periode kedua hingga awal

pekan ketiga Desember (13/12) kemarin, realisasi dana tebusan berdasarkan surat setoran pajak (SSP) hanya bertambah Rp2,69 triliun. Kalau diagregatkan dengan perolehan di sepanjang periode pertama, berarti pemerintah masih “berhutang” sekitar Rp65 triliun selama tiga bulan ke depan.

Nasib yang sama juga melanda realisasi dana repatriasi yang hingga Desember (13/12), masih mencapai Rp143,69 triliun atau berkisar 14,37% dari total target sekitar Rp1.000 triliun. Dengan regulasi dana repatriasi yang secara tidak langsung “memaksa” para *taxpayer* menggunakan hartanya untuk kegiatan investasi dalam negeri (minimal tiga tahun), kita perlu mengakui bahwa partisipasi dan kepercayaan publik masih cukup rendah untuk keamanan berinvestasi. Bagaimanapun kita harus mafhum bahwa kalangan swasta memiliki rasionalitas kuat terkait ekspektasi profit. Kalau daya saing investasi kita tidak cukup atraktif, maka pemerintah bisa kehilangan sumber pendanaan investasi yang dapat dibalang sangat menggiurkan.

Langkah selanjutnya, Indonesia perlu belajar dari 40 negara yang sudah menerapkan dan rata-rata gagal dalam proses pelaksanaannya. International Monetary Fund (IMF) pada 2008 dengan gamblang menjelaskan, kesuksesan *tax amnesty* bagaikan anomali karena sebuah kesuksesan akan dinilai tidak normal dan kegagalan merupakan sesuatu yang

normal. Contoh terdekat kegagalan Filipina karena mekanisme lanjutan pasca pemberlakuan *tax amnesty* tidak dimbangi dengan reformasi sistem perpajakan yang bersifat menyeluruh.

Menurut Alm dan Beck (1993), kebijakan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Colorado tidak berdampak positif baik terhadap tren pengumpulan maupun tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) dalam jangka panjang. Program ini dinilai hanya berperan layaknya “aspirin” (obat pereda demam) yang bersifat sementara. Argumen ini dijustifikasi Alm, Martinez, dan Wallace (2007) yang meneliti pengalaman amnesti pajak di Rusia. Salah satu “kesalahan” utama dari Rusia ialah terlalu sering untuk melakukan kebijakan *tax amnesty*, sehingga banyak masyarakat yang mangkir dari kewajiban pajaknya karena menganggap nantinya akan kembali “dimaafkan” melalui program pengampunan pajak. Ketiga peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kinerja pajak di negara tersebut. Mereka menegaskan bahwa penegakan peraturan setelah berakhirnya kebijakan (*post amnesty enforcement effort*) lebih menjamin terhadap penerimaan pajak daripada sekedar mengulang kebijakan *tax amnesty*.

Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa hanya terpaku pada penetapan target-target penerimaan selama sembilan bulan masa pemberlakuan. Seperti pengalaman

di Colorado dan Rusia, pemerintah juga harus menambah amunisi kebijakan yang dapat melindungi upaya reformasi pajak dan peningkatan *tax compliance*.

Pertama, dukungan dari lingkungan politik. *Breakthrough* melalui berbagai pendekatan yang kemarin dilakukan tiga trisula utama (Presiden, Menkeu, dan Ditjen Pajak), terbukti mampu meningkatkan animo masyarakat untuk terlibat dalam rekonstruksi sektor perpajakan. *Kedua*, desain dan tujuan reformasi perpajakan harus disusun lebih jelas. Pemerintah dapat berdiskusi dengan masyarakat mengenai hambatan tingkat kepatuhan pembayaran beserta tahap-tahap administrasi yang dinilai membebani biaya transaksi. *Ketiga*, pengembangan teknologi informasi perpajakan demi mereduksi potensi penyelewengan dan mengefisiensi proses pengawasan. *Keempat*, perumusan kebijakan, masa transisi, dan proses implementasinya harus dengan cara yang tepat. *Kelima*, peningkatan kapasitas SDM perpajakan sebagai lini yang paling mendesak. Selain demi menjaga integritas dan kredibilitas, SDM perpajakan dinilai dapat berperan sebagai ujung tombak edukasi perpajakan kepada masyarakat. Proses interaksi dengan masyarakat, merupakan cara yang paling efektif untuk mengkampanyekan betapa pentingnya peran pajak dalam proses peningkatan keadilan dan pemerataan pembangunan.

*) Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

APBN Kredibel Bisa Jadi Solusi

Tahun baru berarti harapan baru. Demikian pula yang tercermin dalam kebijakan fiskal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Mengusung tema “APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global”, APBN 2017 dibangun dengan semangat mengembalikan kredibilitas.



Ilustrasi
Wardah Adina

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparannya di Seminar “Indonesia Economic Outlook 2017” kembali menegaskan pentingnya kredibilitas APBN. Menurut Sri Mulyani, APBN yang kredibel menjadi pijakan pasti para pembuat kebijakan terutama saat menghadapi krisis.

“Kalau APBN kredibel, penatausahaan dan tata kelola bagus, angka-angkanya dapat dipercaya, (sehingga) kalau ada *pressure*, (maka) ada rambu-rambunya,” ungkap Sri Mulyani. Lebih lanjut Sri Mulyani memaparkan, APBN yang kredibel akan lebih efektif dan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dalam APBN 2017 berbagai sasaran pembangunan ditetapkan. Namun di sisi lain, APBN disusun agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Caranya dengan menetapkan angka yang realistis dan mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Dampak Ekonomi Global

Sebagaimana diketahui, penyusunan APBN 2017 berlandaskan pada asumsi makro yang telah disepakati antara Kementerian Keuangan dengan DPR beberapa waktu lalu. Dalam pembahasan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diyakini berada di kisaran 5,1 persen. Penetapan target ini dilakukan dengan mencermati perkembangan terkini dari eksternal maupun internal.

Pada sisi eksternal, perekonomian global masih dipengaruhi ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju, perkembangan harga komoditas internasional, serta tren perlambatan ekonomi Tiongkok. Sementara dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja

infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian.

Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Untuk itu, Sri Mulyani meyakini angka tersebut sudah menggambarkan titik seimbang antara optimisme dan kehati-hatian.

“Optimisme karena kita mampu menjaga momentum, kehati-hatian karena kita tahu bahwa tantangan eksternal dan mungkin internal harus kita hadapi dan kita selesaikan” terangnya.

Reformasi Anggaran

Upaya mereformasi sudah sejak 2015 digulirkan pemerintah dalam kebijakan APBN. Maka pada 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN. Sedikitnya terdapat tiga pilar utama dalam reformasi ini. Pertama, optimalisasi pendapatan, Kedua, peningkatan kualitas belanja. Ketiga, menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.

Pada sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. Sementara itu pada sisi belanja, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas. Diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Pada sisi pembiayaan, penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada

kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah.

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan defisit ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian. Dalam postur APBN 2017, pemerintah menetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara untuk belanja negara, pemerintah menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

Melalui kebijakan defisit ekspansif tersebut, setidaknya terdapat lima kebijakan pokok yang diusung pemerintah dalam APBN 2017. Pertama, belanja yang lebih produktif. Kedua, subsidi yang lebih tepat sasaran. Ketiga, penguatan desentralisasi fiskal. Keempat, optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis. Terakhir, fokus terhadap kesinambungan fiskal.

Belanja Lebih Produktif

Demi belanja yang lebih produktif dan berkualitas, kebijakan APBN 2017 diarahkan pemerintah untuk peningkatan belanja infrastruktur dan keberpihakan bagi masyarakat tidak mampu. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui penghematan belanja barang dan

“Artinya banyak fungsi didaerahkan sekarang. Fungsi pemerintah pusat mayoritas sudah didelegasikan ke daerah,”

Sri Mulyani
Indrawati
Menteri Keuangan
Republik Indonesia

belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Lebih lanjut, kualitas perencanaan anggaran diperbaiki, disertai dengan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Porsi anggaran infrastruktur naik secara signifikan dibandingkan APBNP 2016. Sebelumnya, infrastruktur dialokasikan sebesar 15,2 persen, namun kini naik menjadi 18,6 persen dari total belanja negara. Fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga berlaku di daerah. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang APBN yang mengamanatkan agar dana transfer umum dimanfaatkan pemda untuk belanja infrastruktur, sekurang-kurangnya sebesar 25 persen.

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Dalam anggaran kesehatan, misalnya, pemerintah konsisten menjaga porsi 5 persen dari APBN. Fokus pemerintah dilakukan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta mempercepat perbaikan gizi masyarakat.

Sementara itu, anggaran pendidikan konsisten dijaga dengan porsi 20 persen dari APBN. Prioritas kebijakan dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Untuk itu, APBN 2017 menyasar tenaga pendidik melalui tunjangan profesi, menyasar pelajar melalui Kartu Indonesia Pintar, beasiswa Bidik Misi, maupun bantuan operasional sekolah (BOS), serta menyasar sarana pendidikan melalui rehabilitasi ruang sekolah baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Meski belanja pemerintah pusat mendominasi porsi belanja negara, akan tetapi pemerintah telah merumuskan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya. Porsi terbesar diperuntukkan bagi pelayanan umum sebesar 27 persen dari total belanja pemerintah pusat. Diikuti fungsi ekonomi sebesar 23,6 persen, serta fungsi perlindungan sosial sebesar 12 persen. Selain itu terdapat pula fungsi pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, agama, hingga pariwisata.

Subsidi Tepat Sasaran

Perbaikan mekanisme pemberian subsidi turut menjadi fokus pemerintah. Pada subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mengubah subsidi harga menjadi

subsidi tetap yang hanya diberikan untuk solar. Sementara premium sudah tidak lagi disubsidi. Selanjutnya, hasil penghematan digunakan untuk belanja yang lebih produktif.

Tidak hanya itu, mekanisme penyaluran subsidi juga dilakukan agar lebih tepat sasaran. Diantaranya melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Pada subsidi energi bahan bakar minyak, misalnya, subsidi dilakukan bertahap dengan pola distribusi tertutup/*targeted* berdasarkan nama dan alamat. Hal ini juga berlaku untuk subsidi tabung gas LPG 3 kilogram.

Pada subsidi nonenergi, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk subsidi pangan, subsidi benih, subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi pajak, dan subsidi bunga kredit program. Total subsidi nonenergi pada 2017 mencapai Rp82,7 triliun. Salah satu yang cukup menonjol adalah subsidi pangan di mana pemerintah melakukan konservasi secara bertahap dari subsidi pangan (*rastra*) menjadi program bantuan pangan (*non-tunai/voucher*).

Desentralisasi Fiskal

Sebagaimana diketahui, belanja negara dialokasikan untuk belanja pusat serta transfer ke daerah dan desa. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,9 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan belanja K/L sebesar Rp763,5 triliun. “Artinya banyak fungsi didaerahkan sekarang. Fungsi pemerintah pusat mayoritas sudah didelegasikan ke daerah,” jelas Sri Mulyani. Perimbangan antara pusat dan daerah, lanjut Sri Mulyani, telah terjadi dan akan terus terjadi.

Dalam konferensi pers terkait APBN 2017 beberapa waktu lalu, Sri Mulyani

menjelaskan bahwa besarnya jumlah belanja pemerintah pusat dikarenakan adanya sejumlah belanja yang memang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah, seperti belanja yang terdapat di kementerian pertahanan dan kementerian sosial. “Belanja pemerintah pusat hanya pada fungsi-fungsi yang tidak didelegasikan. (Kini) dana desa sudah meningkat sangat besar,” jelas Sri Mulyani.

Pendapatan Negara: Optimal dan Realistis

APBN 2017 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dengan penerimaan pajak dipatok lebih realistis sebesar Rp1.489,9 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program *tax amnesty* dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam hal perpajakan berfokus pada lima hal. Pertama, peningkatan *tax base* dan *tax compliance* melalui optimalisasi kebijakan pengampunan pajak, intensifikasi melalui penggunaan teknologi informasi, serta ekstensifikasi dan penguatan basis data perpajakan melalui optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga.

Kedua, insentif perpajakan antara lain melalui keringanan tarif bagi industri tertentu untuk meningkatkan iklim investasi, daya saing, dan hilirisasi industri dalam negeri. Ketiga, perbaikan regulasi terkait perpajakan. Keempat, pengenaan cukai untuk pengendalian barang konsumsi tertentu melalui kebijakan tarif dan penegakan hukum dan penindakan demi menghindari dampak *negative externality*. Terakhir, perpajakan internasional guna mendukung transparansi.

Langkah-langkah kebijakan yang bersifat teknis juga digalakkan. Diantaranya peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan efektivitas penyuluhan, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Kebijakan tahun 2017 juga difokuskan pada peningkatan *law enforcement* serta melanjutkan program pengampunan pajak yang telah berlangsung sejak semester kedua tahun 2016.

Kesinambungan Fiskal

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan.

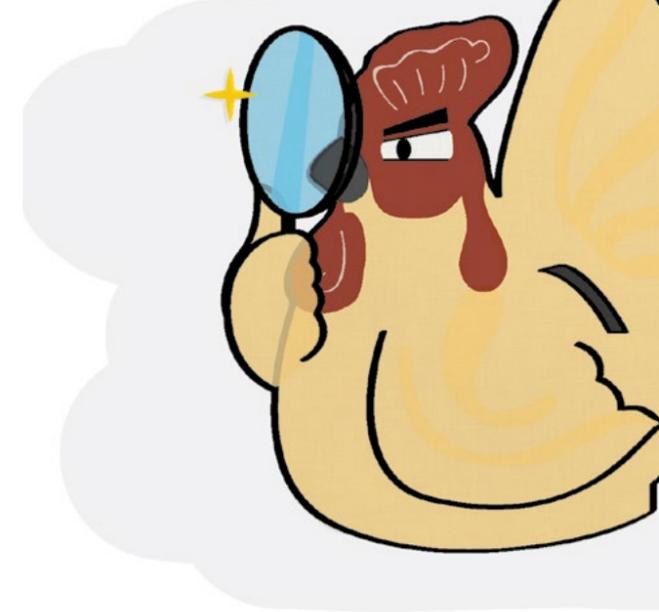
Rasio utang juga terhadap PDB dijaga agar tetap terkendali. Diketahui, defisit Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui

utang dimanfaatkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM. Bahkan pada APBN 2017 pembiayaan investasi ditekan hanya sebesar Rp47,5 triliun. Jumlah ini jauh di bawah APBNP 2016 sebesar Rp94,0 triliun. Sebab pemerintah membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas serta mengutamakan kemandirian BUMN.

Penutup

Sebagai APBN tahun ketiga di era pemerintahan Kabinet Kerja, masyarakat tentu berharap agar APBN dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pemerintah secara tepat dan optimal. Terlebih APBN 2017 memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diikuti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa komitmen sungguh-sungguh dari pemerintah, serta pengawasan dari seluruh masyarakat agar APBN benar-benar menjadi solusi bagi perekonomian negara.

Teks Farida Rosadi





Menuju Belanja Pemerintah Yang Berkualitas

Teks Devi Valeriani*)

Nilai belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitupun pada APBN 2017 yang mencapai Rp2.080,5 Triliun. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi tercermin pada pertumbuhan berdaya saing, stabilitas ekonomi, keseimbangan eksternal, kesejahteraan masyarakat, serta fiskal yang *sustainable*. APBN 2017 didungungkan sebagai APBN yang lebih realistis, kredibel dan berkelanjutan. Kementerian/lembaga (K/L) dan daerah sebagai ujung tombak penyerapan anggaran, harus komitmen dalam membuat perencanaan berbasis kinerja. Sebab, melalui perencanaan yang baik, kualitas *spending* dapat meningkat.

Salah satu kendala yang sering dikeluhkan terkait rendahnya realisasi belanja adalah proses lelang yang memakan waktu. Namun, pemerintah pusat telah melakukan dukungan agar K/L dan daerah bisa memulai pralelang proyek di awal tahun berjalan. Selain itu, pemerintah pusat melalui sinergitas antara K/L, Kementerian Keuangan, dan Bappenas telah menyiapkan akselerasi belanja APBN 2017 melalui DIPA Plus, sehingga program-program K/L selaras dengan program-program Nawacita Presiden Jokowi. Artinya, program-program K/L menjadi lebih selektif, lebih tepat sasaran, dan lebih cepat pelaksanaannya, serta tidak tumpang tindih agar kualitas belanja lebih

terjamin. Jika sinergitas program dan anggaran tidak dilakukan dengan baik, akan sangat sulit mengharapkan belanja yang berkualitas bagi pemerintah dan berdampak pada meningkatnya rasio utang terhadap PDB. Untuk itu, perlu ketegasan pemerintah untuk menghapus belanja negara yang tidak berkualitas atau bersifat *business as usual*.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (K/L dan Non K/L), serta transfer ke daerah dan dana desa. Nilai transfer ke daerah dan dana desa mengalami peningkatan sebesar 36,7 persen dibandingkan tahun 2012. Dengan peningkatan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola pertumbuhan daerahnya melalui berbagai program pembangunan yang mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat desa agar tercapai kemandirian desa secara ekonomi.

Alokasi belanja K/L dalam APBN 2017 masih didominasi oleh belanja barang, sedangkan alokasi belanja modal masih relatif kecil. Diperlukan upaya serius serta pengendalian untuk meminimalkan belanja barang dan menaikkan belanja modal, termasuk peningkatan anggaran infrastruktur dan efektifitas dana bantuan sosial. Peningkatan belanja modal akan mampu menguatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengurangan belanja barang akan mengurangi defisit anggaran.

Kebijakan APBN 2017 tentunya tidak hanya terkonsentrasi pada belanja yang

berkualitas, tetapi juga fokus terhadap kualitas penerimaan negara, sehingga kualitas fiskal dapat terjaga. Sasaran pertumbuhan alokasi belanja K/L pada 2017 berdasarkan *outlook* 2016 sebesar 11,8 persen lebih realistis karena berbasis pada efisiensi dengan tetap konsisten terhadap pembangunan infrastruktur padat karya, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, anggaran kesehatan sebesar 5 persen dan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat terjaga, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Belanja negara juga dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan satu juta rumah melalui subsidi bunga, uang muka, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta mendukung efektivitas dan keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, APBN 2017 diharapkan lebih seimbang, kredibel, serta mampu menjadi pengungkit pembangunan nasional. Meski demikian, tetap menjaga asas kehati-hatian dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Hal ini demi mewujudkan belanja yang berkualitas dan tepat sasaran, sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2017.

*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung



Analisis APBN 2017, Lebih Kredibel?

Teks Hefrizal Handra*)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga kredibilitas anggaran. APBN yang kredibel, menurutnya, memberi kepastian bagi para pembuat kebijakan, terutama saat menghadapi krisis. Anggaran kredibel berarti bahwa angka-angka dalam anggaran tersebut dapat dipercaya, antara lain target pendapatan diyakini akan tercapai, rencana belanja akan terealisasi, dan rencana defisit akan terpenuhi dari sumber pembiayaan. Sementara target pendapatan yang terlalu tinggi dan kurang diyakini ketercapaiannya bisa menimbulkan risiko defisit yang melebar. Bahkan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang yang membatasi defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB.

Pelaksanaan anggaran tahun 2015 dan 2016 memberi pelajaran penting agar menetapkan target pendapatan yang lebih realistis. Pada 2015 capaian penerimaan pajak hanya 83,3 persen dari target Rp1.489,3 triliun. Sementara itu, serapan belanja mencapai 91 persen dari target Rp1.948 triliun. Akibatnya, rasio defisit membengkak mencapai sekitar 2,6 persen dari PDB, melebihi rencana awal sebesar 1,9 persen dari PDB. Kita beruntung, sebab likuiditas pasar masih mampu menyediakan sumber pembiayaan untuk pelebaran defisit tersebut.

Postur APBN 2016 tidak jauh berbeda dengan APBN 2015, di mana target pendapatan dipatok cukup tinggi sehingga dianggap kurang kredibel. Peningkatan target penerimaan pajak

mencapai 24 persen dari realisasi 2015, yaitu Rp1.539,2 triliun. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemotongan belanja, sehingga berisiko pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akibat berkurangnya daya stimulus APBN.

Berkaca pada kondisi dan pengalaman dua tahun sebelumnya, APBN 2017 diyakini banyak pihak lebih kredibel. Target pendapatan dibuat lebih realistis sebesar Rp1.750 triliun. Jumlah ini tumbuh 12 persen dibanding perkiraan realisasi 2016, antara lain pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 14 persen dan PNB sebesar 2 persen (dari perkiraan realisasi 2016). Asumsi angka pertumbuhan penerimaan pajak tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2016 sebesar 24 persen (terhadap realisasi 2015).

Target 14 persen dianggap cukup realistis untuk dicapai. Jumlah ini diperoleh dari perkiraan atas pertumbuhan alami penerimaan pajak, sesuai perkiraan pertumbuhan PDB nominal sebesar 8 persen dan perkiraan pertumbuhan pembayar pajak baru sebesar 6 persen. Perhitungan ini didukung data historis realisasi penerimaan pajak pada 10 tahun terakhir (2005-2015) dengan angka pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen.

Keyakinan atas ketercapaian target penerimaan, serta belanja yang tidak melebihi pagu, memberi keyakinan bahwa defisit APBN 2017 tidak akan melebar. Kepastian jumlah defisit ini memberi kejelasan likuiditas pasar,

sehingga menarik pelaku pasar untuk berinvestasi. Sementara itu, keyakinan atas ketercapaian jumlah penerimaan memberi kepastian besaran rencana belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Bagi Kementerian/ lembaga (K/L), kepastian rencana belanja mencegah kemungkinan pemotongan anggaran di pertengahan tahun. Hal ini memberi kepastian bagi masyarakat dan pihak ketiga yang hendak memanfaatkan belanja negara tersebut.

APBN 2017 juga menunjukkan kehati-hatian para pengambil kebijakan dalam menentukan angka di tingkat *the most probable*. Target rasio defisit sebesar 2,41 persen dari PDB mencerminkan APBN yang ekspansif pada level yang paling memungkinkan untuk dicapai, mengingat kondisi eksternal belum kondusif untuk bersikap lebih ekspansif lagi. Besaran defisit tampaknya telah mengantisipasi kemungkinan likuiditas pasar keuangan yang boleh jadi tidak mengalami perbaikan di tahun 2017. Secara implisit, kebijakan APBN 2017 juga memberi ruang yang lebih luas bagi sektor swasta untuk lebih ekspansif. Apabila likuiditas keuangan membaik dan Indonesia menarik bagi investor, maka dana tersedia untuk sektor swasta akan lebih banyak. Sebab, kebutuhan pembiayaan atas defisit negara sudah lebih pasti dan terhindar dari *crowding-out effect* akibat obligasi dan pinjaman negara.

*) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur



Sepanjang tahun 2016, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Dikarenakan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat, pemerintah mencari terobosan sumber pembiayaan selain APBN. Salah satunya dengan menggaet sektor swasta.

Waduk Jatigede menjulang tinggi di wilayah empat kecamatan di kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembangunan waduk ini sudah ada sejak Presiden Soekarno hingga akhirnya mangkrak selama 50 tahun lebih. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perhitungan kompensasi kepada warga yang terkena dampak proyek tersebut telah dirumuskan. Hingga akhirnya Presiden Jokowi menghidupkan kembali proyek waduk terbesar kedua di Indonesia ini. Waduk Jatigede merupakan salah satu proyek infrastruktur yang kembali diaktifkan karena memiliki manfaat yang besar, yaitu menjamin kesinambungan irigasi dan penyediaan bahan baku tenaga listrik di Jawa Barat.

Tahun 2016 bisa dikategorikan tahun percepatan pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi telah menginstruksikan pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan laju perekonomian nasional, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur baru di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari, peningkatan konektivitas antarwilayah mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama ini menjadi permasalahan di Indonesia. Untuk itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, pemerintah mengambil tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas.”

Infrastruktur dalam APBN

Dalam APBN tahun 2016, tercatat total kebutuhan anggaran infrastruktur mencapai Rp313,5 triliun. Anggaran infrastruktur ini terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu infrastruktur ekonomi sebesar Rp302,6 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp6,5 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp4,4 triliun. Infrastruktur ekonomi ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kelancaran arus

barang dan jasa serta proses produksi. Infrastruktur sosial berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor pendidikan. Sedangkan dukungan infrastruktur meliputi pengelolaan tanah atau lahan, pengembangan kawasan industri, perbaikan iklim investasi, dan sebagainya

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur dalam lima tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 adalah sekitar Rp 4796.2 triliun. Sedangkan kemampuan pemerintah melakukan pembiayaan untuk infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya sebesar 41,25 persen dari total kebutuhan. Lebih lanjut, pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 22,23 persen. Dengan demikian masih terdapat *gap* sebesar 36,52 persen yang diharapkan dapat diisi melalui peran serta sektor swasta.

Pemerintah kemudian melakukan terobosan penggunaan skema pembiayaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan APBN, yaitu melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau yang sering dikenal

dengan *Public-Private Partnership* (PPP). Implementasi skema ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Skema KPBU ini digunakan untuk penyediaan infrastruktur layanan publik yang membutuhkan pendanaan besar, inovasi teknis, bersifat jangka panjang, dan memiliki kelayakan finansial yang cukup menarik bagi badan usaha untuk berinvestasi.

Beberapa proyek infrastruktur prioritas yang menggunakan skema KPBU antara lain Palapa Ring, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2x1000 MW, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, SPAM Bandar Lampung, dan proyek jalan tol Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda, Semarang-Batang, dan Pandaan-Malang. Skema KPBU ini memiliki tiga fasilitas pembiayaan infrastruktur yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPPI) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Tiga fasilitas pembiayaan tersebut antara lain penyiapan proyek melalui skema *Project Development Fund* (PDF), dukungan kelayakan atau *Viability Gap*

Fund (VGF) atas sebagian biaya konstruksi terhadap proyek KPBU, serta jaminan pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Di samping itu, dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur juga melalui penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN). Hingga kini, ada lima BUMN yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pemerintah berupaya mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah melalui berbagai forum. Pada 24 November 2016, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan World Bank, Pemerintah Kanada, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyelenggarakan Indonesia PPP Day 2016 di Jakarta. Forum ini merupakan wadah sosialisasi Kementerian Keuangan terkait kesiapan pemerintah serta ajakan kepada swasta untuk dapat bersama mendukung pembangunan dengan skema KPBU.

Infrastruktur Bagi Negeri

Upaya pemerintah untuk menggenjot laju perekonomian nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur tentu beralasan. *Multiplier effect* yang dapat ditimbulkan dari sebuah pembangunan infrastruktur di Indonesia sangatlah besar. Pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur listrik, gas, dan air, akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur suatu daerah tentu akan membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja, maka sektor hulu (semen, besi, dan lain-lain) dan sektor hilir (konstruksi dan jasa konsultan) akan terkena dampak positifnya.

Pemerataan infrastruktur juga berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. “(Alasan ketimpangan ekonomi) sebagian karena akses yang tidak merata terhadap pelayanan dasar seperti sanitasi, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang baik. Semua ini dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan infrastruktur,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara ASEAN G2B *Infrastructure Investment Forum* di Jakarta pada 8 November 2016.

Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang memberikan



dampak signifikan bagi masyarakat yakni pembangunan LRT (*Light Rail Transit*) dan Tol Trans Sumatera yang termasuk dalam 30 proyek prioritas nasional. LRT di Palembang Sumatera Selatan merupakan jawaban pemerintah atas transportasi alternatif yang memadai bagi warga Palembang dan sekitarnya. LRT Palembang mulai dibangun sejak Oktober 2015 dan ditargetkan selesai pada Juni 2018, yakni sebelum pelaksanaan Asian Games di Palembang dan Jakarta. Dampak langsung pembangunan proyek yang menghabiskan dana Rp7,3 triliun ini mulai terasa. Beberapa usaha kecil masyarakat di sekitar proyek mulai bermunculan, seperti rumah makan, rumah kontrakan bagi pekerja luar Palembang, serta permintaan tambahan bahan bangunan dari proyek.

Tak berbeda dengan pembangunan Tol Trans Sumatera yang diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi di pulau Sumatera sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen memberikan dukungan fiskal dalam pembangunan proyek Tol Trans Sumatera, yaitu melalui penugasan kepada PT. Hutama Karya sebagai kontraktor nasional. Total jaringan Tol Trans Sumatera direncanakan mencapai 2.048 kilometer dan terdiri dari 24 ruas. Pembangunan yang tengah berlangsung saat ini adalah ruas Palembang-Indralaya (Palindra) sepanjang 22 kilometer dengan menelan dana sekitar Rp3,4 triliun.

Pembiayaan Melalui Utang

Pengelolaan pembiayaan anggaran infrastruktur, baik berupa utang atau non-utang, merupakan salah satu tugas Kementerian Keuangan. Melalui DJPPR, Kementerian Keuangan dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) maupun melakukan pinjaman (*loan*). Dari tahun ke tahun, penerbitan SBN terus meningkat dan menjadi sumber pembiayaan utama APBN. Untuk tahun 2016, jumlah *gross* SBN yang akan diterbitkan sebanyak Rp555,7 triliun dengan komposisi penerbitan di pasar domestik sebanyak 76 persen dan di pasar internasional sebesar 24 persen.

Di samping itu, porsi surat berharga konvensional (dikenal dengan Surat Utang Negara atau SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam penerbitan tahun 2016 masih didominasi oleh SUN. Porsi masing-masing SUN dan SBSN sebesar 76 persen dan 24 persen. Terlebih lagi, untuk pertama kalinya pemerintah melakukan transaksi *prefunding* dalam pembiayaan APBN, yaitu penerbitan SBN di suatu tahun (tahun 2015) untuk membiayai APBN di tahun selanjutnya (APBN 2016).

Menjawab Tantangan

Sepanjang tahun 2016, pemerintah mengalami tantangan dalam menarik minat investor untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Diantaranya kepastian skema proyek, kepastian hukum (perizinan), pengadaan lahan, dan komitmen *stakeholder*. Berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1319/KMK.05/2015 tanggal 30 Desember 2015, pemerintah menjawab permasalahan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada 9 Agustus 2016, Menteri Keuangan melakukan peresmian LMAN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

LMAN hadir melaksanakan fungsi optimalisasi atas aset kelolaan guna memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi pemerintah, selain fungsi *landbank* (*bank tanah*) dalam pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur strategis nasional, seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Di samping itu, pembentukan LMAN bertujuan untuk membantu fungsi *operatorship* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam melakukan pengelolaan aset negara sehingga bisa menjadi *revenue center* bagi DJKN.

Menghadapi tahun 2017, pemerintah optimis bahwa prospek investasi infrastruktur Indonesia akan menjadi lebih baik. "Kami percaya bahwa infrastruktur yang lebih baik akan memberikan akses yang lebih mudah ke pasar global, dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan kita dengan baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan *keynote speech* pada forum investasi infrastruktur.

Teks Pradany Hayyu



Mengoptimalkan PPP Dalam Pembangunan Infrastruktur

Teks Muh. Amier Arham*)

Bila diidentifikasi, berbagai macam tantangan pembangunan saat ini sedang dihadapi. Diantaranya produktivitas rendah, kurangnya inovasi, keterbatasan infrastruktur, daya saing rendah, ketimpangan dan kemiskinan. Keseluruhannya membutuhkan respon kebijakan yang cepat, tapi tentu saja tidak mudah sekaligus diselesaikan karena ada hambatan (*constrain*). Maka dicarilah tantangan yang memiliki simpul pengikat yang dapat menghela sebagian dari tantangan yang ada, salah satunya adalah *gap* infrastruktur. Nugraheni dan Priyarsono (2012) menyebutkan infrastruktur secara luas dapat memicu terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Shenggen Fan dan Connie Chan-Kang (2004), mengatakan bahwa pembangunan jalan dengan pengembangan agrikultur, irigasi, pendidikan, listrik dan telekomunikasi, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Maka dari itu, secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur juga menciptakan kesempatan kerja dan usaha (Awal, 2014). Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program

prioritas. Dalam RPJMN 2015 – 2019, biaya yang dibutuhkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur seperti Kereta Api, Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Transportasi Perkotaan, Ketenagalistrikan, Energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Air Minum dan Limbah, dan Perumahan mencapai Rp. 5,519 triliun. Sektor terbesar yang membutuhkan pembiayaan adalah Kelistrikan dengan total Rp980 triliun untuk kapasitas 35.000 MW. Sekalipun skema pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak seluruhnya dibiayai APBN/APBD, diharapkan juga partisipasi BUMN dan Swasta melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau disebut juga dengan skema *Public-Private Partnership* (PPP). Namun, persentase dari total anggaran yang dibutuhkan membangun infrastruktur yaitu 50 persen dari APBN/APBD. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi sumber penerimaan negara tidak memadai untuk membiayai APBN.

Persoalan yang dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan infrastruktur lewat skema PPP, yakni 1) Industri infrastruktur merupakan padat modal (*capital intensive*), 2) Industri infrastruktur terbelang investasi *long term*, sementara pembiayaan yang tersedia baik yang berasal dari perbankan domestik maupun di pasar keuangan merupakan *short term*, dan 3) Regulasi yang ada dalam implementasinya banyak menemui kendala, *enforcement* belum berjalan maksimal. *Constrain* ini membutuhkan

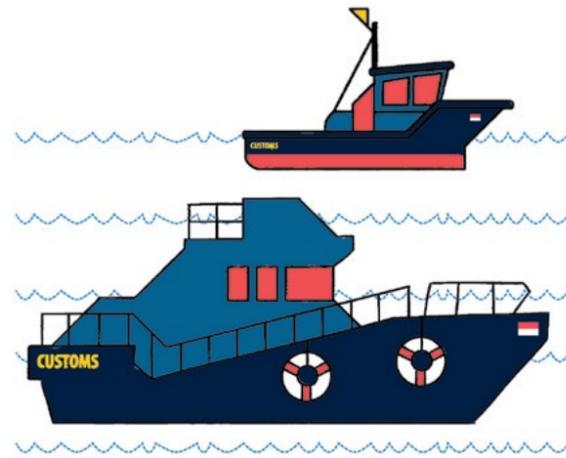
sentuhan langsung dari pemerintah pusat secara sungguh-sungguh. Untuk itu, "intervensi" pemerintah terhadap lembaga keuangan diperlukan agar dapat mengurangi beban bagi pelaku usaha yang menggarap infrastruktur, khususnya infrastruktur yang terhitung kurang efisien namun memiliki nilai ekonomi. Di samping itu, lembaga keuangan domestik diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi intermediasinya dalam rangka pembangunan ekonomi, sekaligus mempercepat penurunan disparitas yang telah lama berlangsung.

Apalagi lembaga *financing* yang menangani masalah pembangunan infrastruktur yang ada seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dimana kemampuannya masih terbatas. Namun setidaknya kehadiran LMAN tentu menjadi lebih baik untuk memperlancar pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol, bandara dan rel kereta api. Kondisi nyata yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah pengadaan lahan, hampir seluruhnya pembangunan proyek strategis dihadang oleh pengadaan lahan karena munculnya percaloan tanah. Hal semacam ini tidak mungkin dilakukan oleh swasta bilamana dilakukan lewat skema PPP. Hal yang tak kalah penting yaitu keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam menyiapkan lahan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

*) Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan FE Universitas Negeri Gorontalo

Memerangi Aksi Penyelundup

Tak ada lagi ruang bagi aksi penyelundupan di Indonesia. DJBC kian memperketat pengawasan dari darat dan laut dalam membendung masuknya barang ilegal. Terbukti, sejumlah prestasi penggalan penyelundupan berhasil dilakukan.



Kapal Patroli Laut BC 9005 melintasi perairan Selat Malaka dengan membawa misi khusus. Sebuah kapal bernama KLM (Kapal Layar Motor) Baru Manganre ditengarai membawa muatan ilegal. Kapal patroli Bea dan Cukai mendekati sasaran dan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan tanpa perlawanan, KLM Baru Manganre terbukti melakukan pelanggaran dengan memuat 80 m³ kayu ulin dan kayu meranti tanpa dilengkapi dokumen muatan yang sah dan surat izin berlayar. Sebuah aksi berani petugas Bea dan Cukai di perbatasan Indonesia ini patut diapresiasi.

Kisah petugas Bea dan Cukai menggagalkan penyelundupan barang ilegal ini merupakan salah satu di antara ribuan cerita sukses lainnya. Tahun 2016, kanal masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih diwarnai kasus-kasus penyelundupan barang ilegal dari luar negeri. Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) melakukan berbagai cara dan inovasi untuk mencegah masuknya arus barang ilegal tersebut. Pengamanan jalur ekspor dan impor di seluruh Indonesia

semakin diperketat, begitu pula dengan koordinasi patroli laut di perairan perbatasan yang semakin diperkuat.

Prestasi Penegahan

Ribuan kasus penyelundupan berhasil digagalkan oleh aparat DJBC di seluruh Indonesia. Jenis barang yang berhasil dihadang masuk ke wilayah Indonesia pun cukup beragam, mulai dari narkoba, rokok, minuman keras tanpa cukai, makanan tak berizin, tanaman, beras, bawang, tekstil, produk perikanan, hingga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Tak hanya jenis barang selundupan yang semakin beragam, modus yang digunakan para penyelundup ditengarai juga semakin kreatif. Namun hal ini tak membuat petugas Bea dan Cukai lengah dalam menghadang masuknya barang-barang tak berizin tersebut.

Kinerja baik DJBC pada tahun 2016 diawali oleh Konferensi Pers Penggagalan Penyelundupan Mutiara ke Hongkong pada 12 Januari 2016 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan. Seperti yang telah diketahui, penggalan penyelundupan tak hanya dilakukan dari luar negeri ke wilayah NKRI, namun juga melalui jalur ekspor ke luar negeri. Aksi

penggagalan penyelundupan mutiara budidaya laut tersebut merupakan kerja sama Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan DJBC dalam aksi ini mampu mengamankan devisa negara hingga Rp45 miliar.

Sinergi Kuat

Upaya DJBC dalam mengamankan wilayah Indonesia dari barang ilegal tentu membutuhkan koordinasi pihak lainnya. Terhitung DJBC beberapa kali melakukan operasi penangkapan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan sebagainya.

Pada 19 Maret 2016, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Entikong bekerja sama dengan Kodam XII Tanjung Pura melakukan pemantauan di jalur hutan sekitar Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong untuk menangkap pembawa barang impor ilegal dengan cara dipikul. Dugaan berdasarkan analisa intelijen tersebut membuahkan hasil.

Dua orang tertangkap membawa gula yang dikemas dalam karung sebanyak 22 karung dengan masing-masing sebanyak 50 kg. Operasi ini merupakan bukti sinergi yang baik antara DJBC dengan Kodam (TNI Angkatan Darat) dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan Indonesia.

Perkuat Patroli Laut

Seiring dengan maraknya kasus penyelundupan melalui transportasi laut dan jumlah penindakan yang cukup signifikan, DJBC juga tak pernah henti memperkuat pengamanan perairan Indonesia melalui patroli laut. Penguatan sarana prasarana patroli laut merupakan salah satu cara menjawab tantangan pencegahan penyelundupan di perairan Indonesia. Pada 12 April 2016, DJBC telah menambah sembilan kapal baru yang akan ditempatkan di Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung Balai Karimun sebanyak lima unit dan PSO Pantoloan sebanyak empat unit. Armada kapal patrol sebelumnya berjumlah 179 unit yang tersebar di seluruh kantor bea dan cukai serta PSO di seluruh Indonesia.

DJBC menyadari pentingnya sinergi internal demi produktivitas yang lebih maksimal. Berbekal tekad meningkatkan pengamanan wilayah NKRI dari penyelundupan barang ilegal, DJBC menggelar operasi patroli laut terpadu dengan sandi Operasi Gerhana. Operasi ini digelar serentak di 16 kantor DJBC di pulau Sumatra, meliputi DJBC Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Riau, Batam, dan Tanjung Balai Karimun. Terhitung dalam satu bulan sejak 7 April 2016, Operasi Gerhana berhasil menggagalkan 27 kali penyelundupan, baik ekspor dan impor, dengan total pemeriksaan kapal sebanyak 272 kali. Hasil 27 penyelundupan yang berhasil ditegah antara lain barang bukti

berupa 120 karung gula pasir, 25 karton minuman Chan Lee Chai dengan kadar alkohol 35 persen, 50 karung bawang merah, dan 50 tilam bekas.

Selain itu, salah satu upaya besar DJBC dalam menyelamatkan perairan Indonesia, khususnya kawasan Selat Malaka, dari penyelundupan yaitu dengan digelarnya Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Operasi PATKOR KASTIMA) Tahun 2016. Dalam periode pertama (7-21 September 2016), terbukti telah dilakukan penindakan sebanyak 12 kali. Sedangkan dalam periode kedua (8-22 November 2016), operasi kerja sama DJBC dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia ini berhasil menindak sebanyak 20 kali.

“Pelaksanaan operasi ini diharapkan menjadi salah satu upaya menjaga keberadaan dan peran institusi negara dalam menciptakan keamanan jalur lalu lintas kapal internasional di mana selat Malaka merupakan salah satu jalur terpadat sehingga isu keamanan menjadi perhatian seluruh negara di dunia,” ungkap Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, dalam Upacara Penutupan Patkor Kastima 2016 pada 24 November 2016 di Batam.



DJBC Melawan Narkoba

Tak bisa dipungkiri, status Indonesia Darurat Narkoba yang dilontarkan Presiden Joko Widodo sejak awal tahun 2015 silam membuat seluruh pihak bekerja keras menanggulangi peredaran narkoba. Di lingkungan DJBC, pencegahan penyelundupan dan peredaran narkoba banyak melibatkan satuan anjing pelacak K9 Bea dan Cukai. Seperti halnya yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang selalu menggunakan anjing pelacak saat bertugas menggagalkan penyelundup di kawasan pelabuhan internasional dan bandara internasional Batam.

Anjing pelacak terbukti cepat mengendus penumpang yang membawa narkoba dengan beragam modus. Keseriusan DJBC terhadap perang narkoba ini terlihat dengan pembangunan gedung Anjing Pelacak Narkotik di Semarang yang telah diresmikan pada 28 Januari 2016 oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi. Dengan fasilitas yang mumpuni, diharapkan anjing pelacak yang dimiliki DJBC mampu bertugas dengan lebih maksimal dalam memberantas penyelundupan narkoba di Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Bea Cukai pada 1 Agustus 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap DJBC mampu menyelesaikan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta tak ada lagi penyelundupan minuman keras dan barang ilegal lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi Bea Cukai pada 1 Agustus 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan harapannya dalam pemberantasan penyelundupan di Indonesia. “Semoga DJBC mampu menyelesaikan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta tak ada lagi penyelundupan minuman keras dan barang ilegal lainnya,” ujarnya.

Teks Pradany Hayyu



Optimalisasi Pemberantasan Penyelundupan Nasional

Teks Akhmad Solikin*)

Menilik situs resmi Kementerian Keuangan, sepanjang tahun 2016 terdapat cukup banyak kasus penyelundupan yang berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya. Komoditas yang diselundupkan pun beragam, mulai dari bawang merah, kayu, minuman beralkohol, elektronika, narkoba, sampai manusia. Kementerian Keuangan pun berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi penegak hukum lain melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di sektor kepabeanan, terutama dengan menanggulangi impor ilegal di pelabuhan resmi dan pemberantasan penyelundupan di pelabuhan tidak resmi (DJBC, 2016a).

Sesuai dengan sifatnya yang rahasia, besaran uang terkait penyelundupan sulit diketahui dengan pasti, meskipun tersedia metode untuk itu (Schneider et al., 2015). Estimasi dampaknya terhadap perekonomian pun sulit dilakukan. Secara normatif, penyelundupan berpengaruh negatif terhadap perekonomian dengan berkurangnya penerimaan negara dan mengganggu industri dalam negeri, ditambah potensi biaya sosial, kesehatan, dan lingkungan. Penyelundupan juga sangat terkait dengan *underground economy* dimana penyelundupan akan menyedot sumber daya dari ekonomi legal

untuk digunakan pada perekonomian ilegal sehingga pertumbuhan ekonomi tidak optimal (Mashiri dan Sebele-Mpofu, 2015).

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menyebabkan besarnya dorongan penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan kecil (Kemenkeu, 2016). Dengan kondisi tersebut, diperlukan kerja sama yang baik antarinstansi yang diamanahi menjaga pintu gerbang wilayah Indonesia. Penguatan patroli laut yang digabungkan dengan pengawasan sumber daya kelautan perlu terus digalakkan.

Perbaikan tata kelola, penggunaan teknologi, peningkatan kerja sama dan koordinasi, peningkatan penindakan, harmonisasi tarif, serta peningkatan kesadaran masyarakat pun dapat dilakukan dengan meningkatkan proses bisnis dan administratif. Penggunaan IT (Information Technology), kerjasama dengan unit lain baik di dalam maupun di luar negeri patut terus dilakukan, misalnya kerjasama DJBC dengan *Customs Administration* Belanda dalam pertukaran data *reputable traders* serta patroli bersama DJBC dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Selat Malaka (DJBC, 2016b).

Harmonisasi tarif bea masuk pun dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah. Tarif yang tinggi secara umum dianggap memberikan

insentif untuk penyelundupan, meskipun terdapat pustaka yang berpendapat bahwa cara menurunkan penyelundupan justru dengan menurunkan tarif, terutama bagi negara besar dan yang permintaan barang impornya inelastis (Yeh, 2000). Di India, program penurunan tarif bea masuk periode 1988-2001 diikuti dengan penurunan penghindaran kewajiban kepabeanan (Mishra et al., 2008). Harmonisasi pun perlu dilakukan dengan negara dalam kawasan mengingat perbedaan tarif dengan negara tetangga merupakan salah satu pendorong penyelundupan (Allen, 2012).

Penegakan hukum efektif untuk mengurangi penyelundupan (Onji, 2014), selain itu juga sebagai senjata utama meskipun bukan merupakan solusi total (Allen, 2012). Strategi penindakan perlu diramu dengan strategi lain yang komprehensif mengingat penindakan dapat menyebabkan pindah lokasi atau metode penyelundupan (Yang, 2008). Selain itu, perlu disadari terdapat *trade off* antara pengetatan prosedur impor dan peningkatan pengawasan atau penindakan dengan program nasional untuk memangkas *dwelling time*. Semoga pemberantasan penyelundupan dapat berperan menghilangkan kejahatan transnasional (Rustam, 2016) dan memberikan andil untuk kesuksesan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia.

*) Pegawai Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Penyesuaian Cukai Rokok Tahun 2017

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan. Secara umum, barang-barang tersebut dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Salah satunya adalah produk turunan tembakau.

Pada Jumat (30/9), Menkeu mengumumkan kebijakan cukai 2017 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Dalam kebijakan Cukai 2017, pemerintah menaikkan tarif cukai dengan kisaran antara 0 hingga 13,46 persen. "Kenaikan tarif cukai tertinggi adalah 13,46 persen untuk hasil tembakau Sigaret Putih Mesin dan terendah 0 persen untuk hasil Tembakau Sigaret Kretek Tangan golongan IIIB dengan rata-rata tertimbang sebesar 10,54 persen," jelas Menkeu. Selain kenaikan tarif cukai, pemerintah juga menetapkan kenaikan harga jual eceran hasil tembakau sebesar 12,26 persen.

Lebih lanjut Menkeu mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penentuan kebijakan cukai 2017. Melalui kebijakan cukai 2017 pemerintah menunjukkan tekad untuk meningkatkan kepedulian akan kesehatan masyarakat. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan pengendalian produksi melalui pembatasan jumlah pabrik rokok. "Kemenkeu melalui DJBC dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik

rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di 2016," terangnya.

Sebulan sebelumnya, sempat bergulir pemberitaan di masyarakat bahwa harga jual rokok akan menjadi sekitar Rp50 ribu dari semula Rp15-20 ribu per bungkus. Usulan kenaikan harga rokok tersebut merupakan hasil studi dari Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany. Hasil studi ini menyatakan bahwa kemungkinan perokok akan berhenti merokok jika harganya dinaikkan dua kali lipat dari harga normal.

Menanggapi isu tersebut, dalam keterangan pers (22/8), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum membuat aturan terbaru mengenai perubahan tarif cukai rokok. Meski demikian, harga eceran maupun cukai rokok memang sudah saatnya ditinjau kembali. "Kemenkeu akan menyusun kebijakan harga jual eceran maupun cukai rokok. Semua dilakukan sesuai Undang-Undang Cukai dan perencanaan APBN tahun 2017. Saat ini, kami masih dalam proses konsultasi

dengan berbagai pihak dan nantinya dapat diputuskan sebelum APBN 2017 dimulai," jelas Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan hal senada. "Kalau kita lihat historisnya, tarif cukai rokok memang naik secara regular. Sementara, untuk tarif tahun 2017 mudah-mudahan bisa kita umumkan paling lama 3 bulan di depan. Ini untuk memberikan waktu kepada semua pihak untuk menyesuaikan diri. Sekali lagi, pemerintah sampai sekarang belum menetapkan tarif dan harga jual eceran," ungkapnya ketika itu.

Selain aspek kesehatan masyarakat, pemerintah juga telah mempertimbangkan aspek-aspek terkait kesempatan kerja, peredaran rokok ilegal, dan juga penerimaan cukai. Sebelum kebijakan ini diambil, pemerintah telah terlebih dahulu berdiskusi dengan semua pihak terkait. "Kebijakan tersebut sudah dibicarakan dengan berbagai *stakeholders*, baik pihak yang peduli dengan kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, maupun asosiasi pengusaha rokok, jelas Menkeu. Dengan begitu, diharapkan

kenaikan tarif rokok yang ditentukan tidak membebani dan mengganggu ketersediaan lapangan kerja serta kinerja industri kecil.

Pro dan Kontra

Pembahasan seputar harga rokok memang selalu menimbulkan ragam pendapat pro dan kontra. Terlebih lagi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau yang dirancang oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Konvensi ini merupakan kesepakatan resmi untuk mengendalikan konsumsi tembakau secara besar-besaran.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan walaupun Indonesia tidak mengikuti konvensi tersebut, namun Indonesia memiliki kebijakan sendiri terkait kesehatan dan rokok. Presiden menambahkan bahwa meski

pemerintah prihatin dengan efek rokok terhadap kesehatan, namun juga perlu memperhatikan jutaan petani dan pekerja industri rokok di Indonesia yang mengandalkan konsumsi rokok.

Harus diakui, jumlah perokok Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terakhir Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, perokok aktif mulai dari usia 10 tahun ke atas berjumlah lebih dari 58 juta orang. Untuk membatasi konsumsi rokok, serta mencegah perokok baru, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah. Selain menaikkan cukai rokok selama beberapa tahun terakhir, pemerintah juga membatasi ruang lingkup untuk iklan rokok. Disamping itu, kini bungkus rokok yang beredar juga wajib diberi gambar peringatan kesehatan.

Sementara, untuk perokok pasif dilindungi dengan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di tempat-tempat umum.

Terkait hal ini, Suahasil, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan bahwa pada prinsipnya Kementerian Keuangan mendukung rencana Kementerian Kesehatan mengaksesi kerangka kerja pengendalian tembakau di Indonesia. Apalagi kebijakan menaikkan harga dan cukai rokok merupakan kesempatan bagi negara untuk mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan, serta cara untuk menyejahterakan petani tembakau.

Diversifikasi Jenis Cukai

Selain cukai rokok, pemerintah mempertimbangkan untuk memperluas objek cukai pada komoditas tertentu yang juga perlu dikendalikan konsumsinya. Kontribusi penerimaan dari cukai plastik sudah dimasukkan pada APBN 2017 sebesar Rp 1,6 triliun. Meski begitu, Heru mengatakan, implementasi cukai plastik masih perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

Menurut Heru, plastik akan menjadi objek cukai baru untuk menekan dampak penggunaannya terhadap kerusakan lingkungan. "Inggris dan Kanada bahkan sudah melarang penggunaan kantong plastik. Kalau mau, konsumen harus bawa kantong plastik sendiri. Sebagian negara lain juga sudah mewajibkan untuk membayar, di Inggris sekitar Rp1000," kata Heru. Menurut Heru, untuk barang-barang plastik yang minim merusak lingkungan dan bisa didaur ulang akan diberi keringanan atau pembebasan cukai.

Sementara itu untuk objek cukai lain, hingga saat ini masih dalam tahap kajian. "Cukai minuman bersoda dan BBM sedang dikaji tapi belum difinalkan, apakah akan diajukan sebagai objek cukai baru. Tapi sekarang lagi fokus di cukai plastik," ungkap Heru.

Teks Irma Kesuma Dewi



Cukai Tembakau, Benci Tapi Rindu

Teks Agus Tony Poputra*)

Saat ini, rokok dianggap sebagai penyebab segala penyakit. Dalam kehidupan sosial perokok semakin disisihkan. Pada fasilitas umum, area merokok dibuat sangat terbatas. Masyarakat lupa bahwa penyakit disebabkan berbagai faktor dan bukan sekedar dari rokok. Polusi serta pola makan dan pola hidup yang tidak sehat juga menurunkan kualitas hidup.

Lebih lanjut, cukai rokok memberi kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Dengan demikian, persoalan rokok bagaikan pepatah "benci tapi rindu." Rokok dibenci namun pendapatan cukainya dirindukan. Tahun 2015, penerimaan cukai tembakau sebesar Rp139,5 triliun atau 96 persen dari total pendapatan cukai dan 7,92 persen dari total pendapatan APBN-P tahun 2015 sebesar Rp1.761,6.

Pendapatan cukai tembakau juga jauh di atas penerimaan amnesti pajak tahun 2016. Tidak seperti amnesti pajak yang hanya dilakukan dalam interval waktu tertentu, cukai tembakau diterima setiap tahun. Sebab itu, kebijakan cukai rokok perlu pertimbangan komprehensif.

Permintaan rokok dan masalah sosial

Kebijakan menaikkan cukai rokok mendapat beragam tanggapan positif, terutama dari pihak anti rokok. Alasannya akan menurunkan penjualan rokok sehingga baik bagi kesehatan,

meningkatkan produktivitas kerja, dan menurunkan biaya kesehatan. Terdapat juga pendapat dan fakta bahwa kenaikan tarif cukai rokok menaikkan pendapatan cukai. Namun hal terakhir ini, tidak akan terjadi terus-menerus bila kenaikan tarif cukai berlebihan.

Permintaan rokok di Indonesia saat ini memang inelastik. Persentase kenaikan harga lebih tinggi dibanding persentase penurunan kuantitas rokok yang diminta. Secara teoritis, semakin mahal harga suatu barang, maka permintaan barang tersebut menjadi elastik, yaitu persentase kenaikan harga lebih rendah dibandingkan persentase penurunan permintaan. Ini akan mengakibatkan pendapatan dari barang tersebut menjadi lebih rendah.

Kondisi seperti ini dapat terjadi pada rokok. Semakin tinggi cukai tembakau akan mengakibatkan penurunan pendapatan cukai, terutama dengan munculnya rokok elektronik. Kenaikan tarif cukai juga akan mempengaruhi para petani tembakau dan cengkeh. Angka kejahatan terkait kebutuhan uang untuk membeli rokok pada masyarakat marjinal bisa meningkat, bila pemerintah gagal mempersuasi mereka untuk berhenti merokok secara sukarela. Selain itu, akan mendorong permintaan atas rokok ilegal.

Rokok ilegal dan substitusi rokok

Keberadaan rokok ilegal memberi

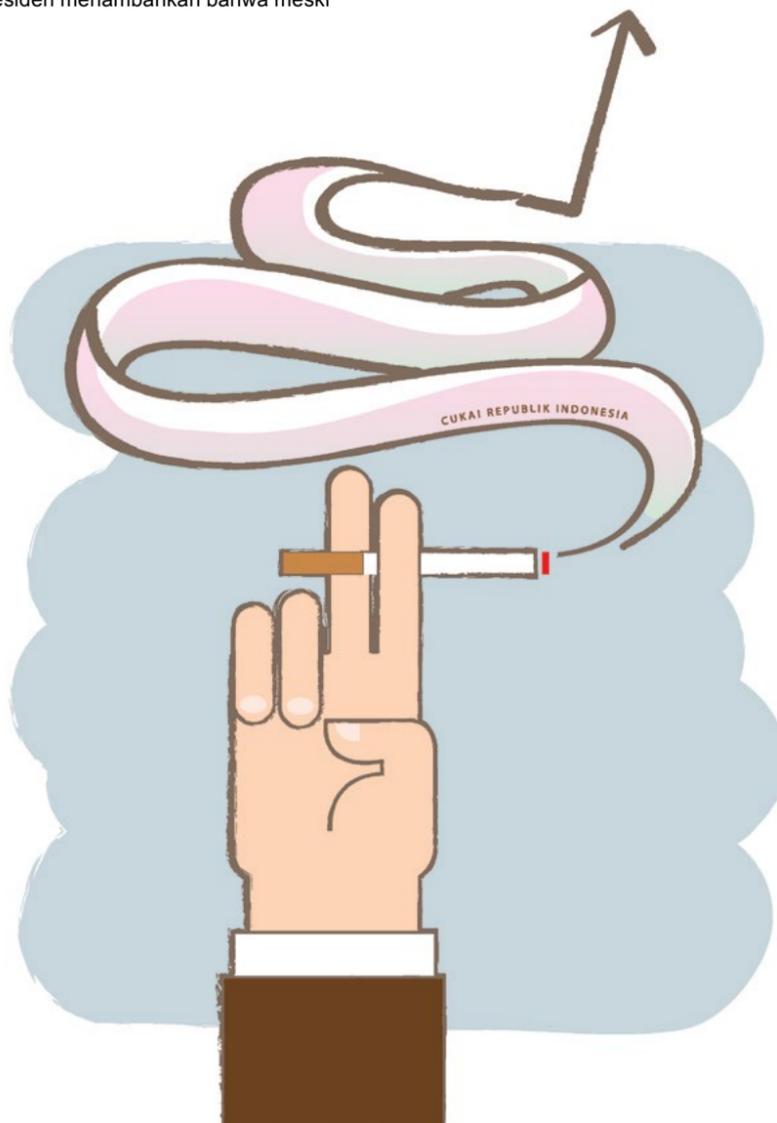
kerugian total. Negara harus menanggung biaya kesehatan akibat rokok, namun tidak memperoleh kompensasi untuk kerugian tersebut. Kondisi ini seperti terjadi pada bisnis narkoba. Dengan menaikkan tarif cukai rokok akan menyuburkan beredarnya rokok ilegal.

Di samping itu, rokok legal mendapat saingan baru yaitu rokok elektrik. Saat ini, produk tersebut belum tersebar luas. Namun bila harga rokok meningkat signifikan yang disebabkan kenaikan tarif cukai, maka bukan tidak mungkin produk ini menjadi substitusi bagi perokok tradisional. Mengingat aturan cukai tidak mengatur rokok elektronik, pemerintah akan menghadapi penurunan pendapatan cukai.

Strategi untuk Meningkatkan Pendapatan Cukai Tembakau

Strategi meningkatkan pendapatan cukai tembakau perlu dilakukan secara cermat. Pertama, menaikkan tarif cukai tembakau secara bertahap, dengan mempertimbangkan elastisitas permintaan agar kenaikan tersebut tidak menurunkan pendapatan cukai. Kedua, melegalkan rokok-rokok ilegal agar dapat memperoleh tambahan pendapatan cukai. Ketiga, merevisi aturan cukai untuk meregulasi rokok elektronik. Dengan demikian pemerintah dapat menarik cukai atas produk substitusi tersebut.

*) Dosen Universitas Sam Ratulangi



Kombinasi Antara Optimis dan Hati-Hati

Sepanjang 2016, situasi ekonomi global menghadapi banyak tantangan. Selain harga komoditas yang masih relatif rendah, perdagangan dunia juga masih melambat. Situasi tersebut berimbas pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro di awal tahun ini mengungkapkan bahwa pemerintah optimistis mampu bekerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Pemerintah menyiapkan tiga resep khusus untuk mengubah tantangan ekonomi global menjadi kesempatan. Ketiganya adalah menjaga daya beli masyarakat, menggairahkan investasi, dan mendorong kualitas belanja pemerintah.

Pada 2015, perekonomian Indonesia dibayangi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok yang membuat kinerja ekspor terpengaruh. Di samping itu, penurunan harga minyak dunia yang jauh di bawah perkiraan sempat menimbulkan gejolak di pasar saham, nilai mata uang, dan mempengaruhi indikator ekonomi lainnya. Harga minyak yang sempat di bawah 30 dollar Amerika Serikat (AS) per barrel, menurut Bambang, benar-benar membuat *nervous* banyak negara dan pelaku ekonomi.

Tahun 2016 menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus momentum bagi perekonomian Indonesia. Berbagai terobosan di bidang pengelolaan fiskal dilakukan. Pertama, reformasi struktur anggaran dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, belanja produktif dan berkualitas, serta pembiayaan berkesinambungan. Kedua, kebijakan-kebijakan jangka pendek untuk mendorong kinerja ekonomi juga dirilis. Pemerintah melanjutkan penerbitan paket-paket kebijakan yang telah dimulai sejak 2015.

Pada bulan April, International Monetary Fund (IMF) mengeluarkan laporan tentang perekonomian Indonesia. Sebagaimana dimuat dalam asesmen *Article IV Consultation*, penguatan signifikan dalam kerangka kebijakan Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan ketahanan makroekonomi, sehingga berhasil memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan. Kepala Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breuer, sebagaimana dikutip dari situs IMF, mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir,

manajemen moneter yang baik dan pengelolaan fiskal yang bijaksana telah memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Apresiasi juga datang dari Bank Dunia. Pada pertengahan Mei, Bank Dunia mengeluarkan prediksi laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,3 persen pada tahun 2016 dan 6,2 persen pada tahun 2017-2018. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri mencapai 5,1 persen pada tahun 2016. Peningkatan pertumbuhan bisa terjadi pada tahun depan, yaitu berada di kisaran 5,3 persen.

Bank Dunia menggarisbawahi peningkatan bisa terjadi dengan catatan keberhasilan paket reformasi kebijakan dan implementasi program investasi publik yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam laporan *The East Asia and Pacific Update*, Bank Dunia menekankan pentingnya kebijakan makroekonomi yang cermat dan kelangsungan reformasi struktural. Bank Dunia juga menyarankan seluruh negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk memperhatikan kebijakan fiskal agar dapat menghadapi kemungkinan adanya guncangan global. Apalagi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih



akan melambat, sehingga akan turut melemahkan permintaan dan pertumbuhan di kawasan.

Dorongan amnesti pajak

Isu ekonomi sepanjang 2016 tak bisa dilepaskan dari kebijakan amnesti pajak. Isu ini bahkan berhembus sepanjang tahun. Juru Bicara Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengungkapkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang (UU) Amnesti Pajak memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, pengampunan pajak

diharapkan dapat turut menggerakkan perekonomian. Caranya dengan mengembalikan uang milik orang-orang Indonesia melalui skema repatriasi. Di samping itu, kebijakan ini juga dipandang sebagai momentum tepat untuk membangun *data base* perpajakan yang lebih baik dan valid. Dalam sistem pelaporan pajak *self assessment*, akses terhadap data basis pajak menjadi kunci. *Ketiga*, pemberlakuan *tax amnesty* bisa menambah penerimaan negara.

Pada konferensi pers di Aula Djuanda

Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (14/10), Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Bambang Brodjonegoro menilai masih banyak peserta potensial pada periode II dan III amnesti pajak. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya jumlah peserta amnesti pajak periode pertama, jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Secara geografis, Menkeu melanjutkan, jumlah peserta amnesti pajak di wilayah DKI Jakarta, termasuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Khusus, tercatat sebanyak 134.512 WP. Angka tersebut baru sebesar 6,4 persen dari jumlah WP yang wajib melaporkan SPT-nya, yakni 2.088.747 WP.

Perekonomian 2017

Saat menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (06/12), Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya sikap waspada terhadap ketidakpastian perekonomian global yang masih terus berlangsung. Menurutnya, risiko ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari faktor eksternal. Sebagai contoh, ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan di AS, rencana kenaikan tingkat bunga Bank Sentral AS *The Fed*, dan pelemahan ekonomi Tiongkok.

Menurut Presiden, kepala

pemerintahan di berbagai negara mengeluhkan hal yang hampir sama, yaitu pelemahan pertumbuhan ekonomi dan kesulitan mencari investasi (*capital inflow*). “Yang paling penting untuk dikerjakan adalah menarik investasi sebesar-besarnya ke negara kita. Saya sudah memberikan perintah kepada tim ekonomi, terutama kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bahwa target target investasi yang masuk ini harus betul-betul dikejar dengan cara apapun,” ujar Presiden. Presiden berharap BKPM dapat memenuhi target investasi masuk tahun 2017 sebesar Rp670 triliun. “Target kita kira-kira Rp670 triliun, dengan jurus apapun harus dikejar. 2018 target kita kira-kira Rp840 triliun, sehingga ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara dalam Seminar “Indonesia Economic Outlook 2017” mengungkapkan bahwa pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,1 persen dalam APBN 2017. Menurut Menkeu, angka pertumbuhan tersebut menggambarkan titik yang seimbang antara optimisme dan kehati-hatian. “Optimisme karena kita mampu menjaga momentum, kehati-hatian karena kita tahu bahwa tantangan eksternal dan mungkin internal harus kita hadapi dan kita selesaikan” terang Menkeu di Mainhall Bursa Efek Indonesia pada Rabu (23/11).

Pada acara yang dihadiri para pelaku pasar keuangan itu, Menkeu memaparkan kondisi ekonomi terkini dan *outlook* ekonomi 2017. Beberapa institusi meramalkan kondisi ekonomi yang lebih

baik dibandingkan tahun lalu. Bank Dunia, misalnya, memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 5,3 persen. Sementara Asian Development Bank 5,1 persen, Bloomberg Consensus Forecast 5,3 persen, S&P 5,2 persen, Fitch 5,5 persen, dan Moodys 5,2 persen.

Ditemui setelah menduduki posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyampaikan perlunya bersikap siaga setelah pemilihan presiden AS. “AS mempunyai presiden baru yang kita belum tahu bagaimana arah kebijakannya. Di samping itu, kenaikan tingkat bunga di sana pasti membuat modal itu kembali lagi ke AS, bukan lagi ke *emerging country* seperti Indonesia,” kata Bambang. Menurutnya salah satu kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah pada tahun depan adalah menjaga konsumsi masyarakat. “Yang paling penting strategi 2017 adalah ekspor agar jangan terlalu minus pertumbuhannya, konsumsi harus dijaga, dan ketiga investasi harus didorong lebih tinggi,” ujarnya lagi.

Pemerataan ekonomi

Penyusunan APBN 2017 dilakukan dengan merespons kondisi ekonomi global. Pada 2017, APBN menerapkan prinsip kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap menjaga kehati-hatian. Salah satu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah efisiensi belanja barang. “Kebijakan fiskal kita adalah ekspansif namun tetap dalam prinsip kehati-hatian. Itu hanya bisa dilakukan, tanpa membuat fiskal menjadi tidak *prudent*, melalui efisiensi belanja barang,”

ujar Menkeu.

Dalam APBN 2017, pemerintah akan berupaya memperbaiki pemerataan ekonomi, terutama dengan memperhatikan masyarakat yang berada di level ekonomi 40 persen terbawah. “Jadi kita tetap mencapai tujuan APBN, yaitu belanja untuk infrastruktur, belanja untuk prioritas pendidikan, kesehatan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat terutama di level 40 persen terbawah, dan menjaga kondisi Indonesia dalam menghadapi kemungkinan bencana alam. Namun pada saat yang sama, kita tidak melakukan ekspansi dengan menambah belanja terlalu banyak,” kata Menkeu dalam kesempatan bertemu media pertengahan bulan November di Jakarta.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di kantor Bank Dunia Indonesia, Jakarta, *Lead Economist* Bank Dunia Indonesia Vivi Alatras mengungkapkan bahwa ada empat prasyarat yang harus diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Keempat prasyarat itu adalah mengatasi *unequal opportunity*, memberikan upah yang baik pada tiap level tenaga kerja, memiliki kemampuan untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, dan melakukan pembenahan kebijakan fiskal, termasuk subsidi. Vivi juga menekankan terwujudnya ekonomi inklusif memerlukan kehadiran seluruh elemen masyarakat. “Butuh keselarasan langkah bersama antara pemerintah dengan *private sector*, komunitas, kelompok *think thank*, dan lain-lain,” kata Vivi yang ditemui pada pertengahan November lalu.

Teks Dwinanda Ardhi



Presiden Donald Trump dan Prospek Ekonomi Kita

Teks Muhammad Handry Imansyah*)

Perekonomian Indonesia telah mengalami konsolidasi dan perlambatan ekonomi tampaknya mulai tertahan. Pertumbuhan ekonomi mulai membalik ke atas dengan hasil selama tiga triwulan yang tumbuh rata-rata lima persen. Tingginya permintaan konsumsi masyarakat merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi selain investasi. Konsumsi pemerintah yang mulai meningkat di triwulan kedua setelah sempat tertahan karena penundaan belanja akibat adanya kebijakan *self blocking* pada DIPA kementerian/lembaga.

Keberhasilan program pengampunan pajak tahap pertama juga menjadi faktor pendorong. Penerimaan tebusan pajak mencapai Rp137 triliun untuk repatriasi dan Rp97,2 triliun untuk uang tebusan (Detikfinance, 1/10/2016). Tekanan neraca pembayaran juga sudah berkurang dan menunjukkan surplus akibat menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial. Sementara itu, tingkat inflasi yang cukup terjaga dan tekanan kurs rupiah terhadap USD juga semakin berkurang dengan semakin sempit volatilitasnya.

Berbagai modal dasar di atas memberikan keyakinan prospek ekonomi Indonesia pada 2017 akan lebih baik dibandingkan dengan 2016. Namun, masih ada berbagai risiko yang mungkin timbul di 2017. Risiko itu misalnya masih

lambatnya pemulihan ekonomi global akibat *Brexit*. Risiko lainnya adalah potensi dampak terpilihnya Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Berbagai program ekonomi Presiden Trump dinilai lebih fokus untuk penguatan ekonomi domestik dan proteksionis.

Risiko yang mengancam

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa menambah ketidakpastian dalam pemulihan ekonomi global. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris sebesar 0,2 persen dan Amerika Serikat sebesar 0,3 persen dari perkiraan awal sebelum kemenangan Presiden Trump. Namun, dengan kemenangan Trump, kemungkinan besar justru pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Berbagai kebijakan Trump akan lebih proteksionis dengan membangun infrastruktur dan industri militer melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Misalnya kebijakan perdagangan luar negeri Presiden Trump yang akan mengenakan tarif 45 persen untuk impor dari Tiongkok. Namun, Tiongkok tentu tidak akan tinggal diam, apalagi Negeri Tirai Bambu memegang surat utang sekitar 1,25 triliun dolar AS yang menempatkannya menjadi negara terbesar pemegang surat utang AS. Di lain sisi, suku bunga *the Fed* diperkirakan akan meningkat pada akhir tahun 2016, karena mulai meningkatnya inflasi.

Potensi dampak dan prospek

Kebijakan ekonomi Presiden Trump akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2017. Pertama, pengaruh kenaikan suku bunga di AS berpotensi menyebabkan makin mahalnya pembiayaan APBN. Kedua, akibat kebijakan perdagangan proteksionis yang dilakukan AS dengan penerapan tarif impor yang tinggi pada Tiongkok, akan menyebabkan semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang 20 persen ekspornya di pasar AS. Pengaruh ini akan merembet pada ekspor Indonesia ke Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya semakin melambat.

Di tengah kerawanan risiko yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia, terdapat potensi yang memberikan harapan untuk tumbuh lebih tinggi. Hal ini ditopang dengan sudah mulai bangkitnya harga berbagai komoditi di pasar dunia. Selain itu, 14 paket kebijakan tampaknya mulai membuah hasil dengan semakin membaiknya kemudahan dalam membuka usaha (*ease of doing business*). Dengan berbagai kemudahan ini, maka investasi akan semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-5,5 persen sudah sangat memadai karena di negara-negara berpenduduk besar dan *emerging market*, pertumbuhan Indonesia hanya disaingi oleh Tiongkok dan India.

*) Dosen Universitas Lambung Mangkurat

APBN dan Rambu Pengelolaan Keuangan Negara

APBN yang realistis dan kredibel menjadi faktor penting dalam mengelola perekonomian negara. Dalam situasi global yang masih tidak menentu, prinsip kehati-hatian tak boleh ditinggalkan begitu saja. Pesan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009–2014 sekaligus Menteri Keuangan periode 2001–2004, Boediono, saat menerima Media Keuangan untuk sebuah sesi wawancara khusus di kediamannya di daerah Menteng, Jakarta. Pak Boed—sapaan akrabnya—berbagi banyak pandangan menarik seputar pengelolaan APBN dan tantangannya ke depan sesuai menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa di Aula Mezzanine Kantor Pusat Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (30/11).

Pengelolaan APBN yang semakin baik telah dimulai saat Anda menjabat sebagai Menteri Keuangan, antara lain dengan membuat rambu-rambu pengelolaan anggaran melalui paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Menurut pandangan Anda, apa saja ruang perbaikan yang dapat dilakukan dalam APBN ke depan?

Saya kira yang dilakukan para menteri keuangan setelah saya, termasuk Bu Sri Mulyani, dalam menjabarkan rambu-rambu tadi ke dalam satu set aturan operasional—termasuk membuat neraca misalnya—adalah langkah-langkah yang seluruhnya dapat dituntaskan. Menurut saya masih perlu dituntaskan neraca yang baik, yaitu neraca yang juga memuat sistem *monitoring* utang kita, utang pemerintah ya. Itu yang saya kira perlu, termasuk neraca yang memuat utang non-pemerintah. Jadi, perlu semacam sistem *monitoring* di mana resiko-resiko yang bisa membebani APBN ke depan bisa diantisipasi.

Secara umum, barangkali yang penting adalah sasaran kebijakan dari sisi penerimaan. Kalau kita bandingkan sisi penerimaan dengan *tax ratio*, katakan dengan negara-negara sekitar, itu masih menjadi hal yang dapat kita kerjakan (meningkatkan *tax ratio*). Jadi APBN ini motornya adalah penerimaan. Awalnya *kan* dari situ. Itu bisa digarap lebih baik lagi dengan upaya berkelanjutan karena mencapai itu tidak mudah.

Yang kedua dari sisi pengeluaran, menurut saya *quality of spending* itu penting. Pada akhirnya, pengeluaran juga tergantung dengan penerimaan dan pembiayaan. *Financing* itu *kan* kita beri rambu, menurut saya *sih* itu tetap harus ada rambu. Pengelolaan defisit tidak boleh lepas, karena pengalaman kita sendiri di masa lampau, kalau ini lepas ya sengsara

nanti. APBN lepas karena defisitnya lepas, maka ekonominya sengsara. Nah kualitas pengeluaran itu bermacam-macam, termasuk efektivitas setiap *cost* pemakaiannya, alokasi antarpos, subsidi, dan sebagainya.

Kemudian, ada lagi hal yang dalam jangka panjang saya kira perlu digarap, yaitu *contingent liability*. Menurut saya, *contingent liability* harus diadministrasikan secara tertib dan dianalisa dengan benar pengaruh bebannya seperti apa ke depan.

Ada juga *contingent liability* lain yang lebih konkrit, yaitu pensiun, termasuk pensiun TNI dan POLRI. Itu saya kira harus dihitung berapa yang harus dibayar setiap tahunnya dan persiapannya berapa anggaran yang dibutuhkan. Sekarang saya kira (hal ini) belum dilakukan, tapi saya tidak tahu apakah sudah ada *exercise* yang bisa menunjukkan semua biaya pensiun sudah tertutup dalam beberapa tahun ke depan.

Dana pensiun yang aman ini termasuk bukan hanya menghitung dana yang ada, melainkan juga menurut saya harus dibuat sistem baru dimana manajemen dana pensiun saat ini harus dicari kesempurnaannya, sehingga beban APBN untuk pembayaran dana pensiun ke depan itu lebih transparan, lebih bisa ditanggung. Nah ini *contingent liability* yang saya kira sangat penting.

Bagaimana kiat untuk mengelola utang?

Utang pemerintah menurut saya sudah *manageable*. Sekarang utang pemerintah dibandingkan dengan persentase PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 24-25 persen. Jika persentase ini dibandingkan dengan negara lain sudah oke *lah*. Masalahnya bagaimana rasio ini kita pertahankan dan jaga jangan sampai

ada letupan-letupan ke depan.

Proyeksi profil utang yang jatuh tempo agar selalu dijaga. Jangan sampai pada suatu tahun kita kaget karena harus membayar jumlah yang besar. Sejak beberapa tahun sebelumnya kita sudah bisa menghitung (utang jatuh tempo) ini. Saya yakin kalau rasio 24-25 persen utang terhadap PDB itu *manageable* dan merupakan sebuah *achievement* yang baik.

Masalahnya, utang-utang di luar utang pemerintah itu besar, seperti utang BUMN dan nanti ke depan—yang sekarang belum terlihat menjadi masalah—adalah utang pemerintah daerah. Kemungkinan suatu saat nanti ini bisa membesar dan menimbulkan masalah seperti di Argentina dulu. Masalah di sana, krisis bukan dari pemerintah pusat, tapi ada puluhan provinsi yang utangnya besar dan tidak dimonitor. Sekarang kalau Indonesia masih belum *lah*. Pemerintah daerah saat ini masih dalam batas-batas yang sangat aman dalam pengelolaan utangnya, demikian juga BUMN. Yang paling sulit itu memonitor utang swasta. Saya kira itu.

Jika dikaitkan dengan economic recycle (peristiwa ekonomi yang berulang) di mana kita harus banyak belajar dari peristiwa masa lalu, bagaimana prioritas terkait pelajaran ekonomi masa lalu yang dapat menjadi perhatian pemerintah dalam satu hingga lima tahun ke depan?

Saat ini orang berpendapat ekonomi global melambat dan sampai berapa lama waktunya kita belum tahu. Melambat itu implikasinya bagi kita adalah ekspor yang mungkin tidak sekuat tahun 2009-2012 di mana harga komoditas kita bagus. Harga batubara dan mineral kita mungkin akan seperti ini ya (tidak kuat) barangkali. Ini

harus kita antisipasi.

Kalau dari segi keuangan, perkembangan sektor riil dunia itu yang saya sebut tadi, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia sampai sekarang kalau orang lihat belum ada titik (naik) dan akan kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Dari situ, sektor keuangan juga belum jelas. Masalah keuangan ini juga mempengaruhi kita, misalnya apakah aliran dana akan normal atau tiba-tiba dananya kembali (ke negara maju) karena ada kebijakan yang membuat dana yang biasanya menjadi pelumas di negara-negara lain termasuk Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara itu kemudian ditarik lagi ke sana.

Ini tergantung *policy-policy* yang terjadi di Amerika, Eropa, China, dan sebagainya. Belum jelas sekarang. Kalau menurut saya, prinsip hati-hati itu ya yang paling bisa kita ambil.

Bagaimana kita bisa menyeimbangkan prinsip kehati-hatian dan percaya diri dalam mengelola APBN. Jika kita lihat, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen termasuk tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain.

Pertama, yang paling aman adalah APBN yang realistis. Kalau APBN itu realistis, maka akan jadi kredibel. Yang dikatakan Ibu Menteri betul sekali, angkanya itu harus masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, jelas tidak kredibel dan dipedulikan orang. Masalahnya, APBN kita itu tergantung kepada barometernya. Apakah pertumbuhan, inflasi, produksi minyak, dan indikator-indikator lain. Itu semua barometer dasar untuk menghitung APBN.

APBN yang kredibel dan realistis tergantung kepada asumsi barometer ini. Yang saya bayangkan ke depan, barangkali

barometer-barometer ini jangan diputuskan dalam proses yang terlalu politis. Asumsi dasar ini lebih banyak seyogyanya menggunakan perkiran estimasi objektif dari ahli. Ahli itu tidak perlu dari kementerian atau DPR saja. Bisa juga menggunakan ahli yang independen yang memberikan angka terbaik. Asumsi pertumbuhan ekonomi tahun depan, misalnya, bukan negosiasi proses politik karena di situ ada resikonya, yaitu tidak realistis.

Kalau mau APBN-nya realistis, kedua pihak harus setuju untuk mencari angka yang paling objektif. Bukan cari ruang yang angkanya bisa dibagi-bagi. Nah, APBN ini kesepakatan politis antara DPR dan pemerintah karena ini soal kredibilitas dari APBN yang menyangkut semua.

Jika dikaitkan dengan desentralisasi fiskal, APBN kita saat ini telah lebih banyak mengalokasikan belanja untuk dana desa dan dana transfer ke daerah. Menurut pandangan Bapak, bagaimana desentralisasi fiskal bisa mempercepat pembangunan desa tertinggal dan sekaligus juga mendorong ekonomi nasional?

Ekonomi nasional *kan* terdiri atas ekonomi daerah, jadi kalau ekonomi daerah maju, secara definisi ekonomi nasional maju juga. Jadi soal pembagian dana ke daerah yang makin besar, itu kalau secara prinsip bagus. Hanya pemanfaatannya saja di daerah itu bisa menumbuhkan pertumbuhan atau tidak, bisa meningkatkan pemerataan ekonomi atau tidak. Nah ini saya kira kuncinya bukan seberapa besar bagian dari pusat dan daerah. Kalau melihat dengan suasana desentralisasi otonomi yang sekarang, ini suatu sistem desentralisasi yang cukup maju. Oleh sebab itu, nantinya harus ada peningkatan dana yang masuk

ke daerah. Itu implikasi logis dari suatu sistem yang seperti ini. Yang harus kita jamin bahwa uang ini dipakai oleh daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Namun, daerah itu kan bagian dari pusat. Kalau ada keinginan penambahan daerah pemekaran terlalu banyak, lama-lama tidak benar jika nanti uangnya (APBN) hanya untuk dibagi-bagi, tidak untuk tujuan pertumbuhan di daerah, pendapatan perkapita di daerah, peningkatan kesejahteraan, dan termasuk pendidikan di daerah. Hal-hal ini harus jadi sasaran utama bagi setiap daerah (dalam mengelola anggaran).

Kalau kemudian timbul daerah-daerah pemekaran baru ya tinggal kecil-kecil nanti (anggarannya) dan mungkin tidak efektif. Jadi intinya saya kira sudah oke arahnya makin banyak ke daerah karena memang fungsi pusat itu kalau secara undang-undangnya *kan* makin kecil. Kuncinya, daerah harus ditingkatkan kemampuannya untuk meningkatkan efektivitas dana yang sampai di sana dan untuk membuat program-program yang baik, misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Jangan sampai kalau terlalu banyak uang atau kewenangan di daerah, tanpa ada koordinasi antardaerah, lalu akibatnya masing-masing ingin membangun pelabuhan dan bandara sendiri. Harus ada misalnya dalam konteks ini, *blueprint* infrastruktur nasional. Bagaimana konektivitas laut itu pelabuhannya harus dipilih supaya menyatukan. Pemerintah daerah bisa mengambil bagiannya masing-masing. Mereka diberi uang, tapi harus mengikuti *blueprint* nasional mengenai konektivitas laut misalnya.

Teks Dwinanda Ardhi

Tak Henti Hasilkan Temuan dan Prestasi

Dody Qori Utama “membalas” kegagalannya meraih impian masa remaja untuk menjadi dokter dengan deretan prestasi tingkal nasional dan internasional di bidang yang ditekuninya. Yang terkini, anak muda kelahiran Padang, 25 September 1987 itu baru saja meraih penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai Peneliti Transportasi Terbaik 2016. Dody saat ini tengah menyelesaikan pendidikan doctoral di bidang *biomedical engineering* di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dalam wawancara dengan Media Keuangan belum lama ini, Dody menjelaskan bahwa bidang *biomedical engineering* yang menjadi spesialisasinya merupakan kombinasi antara bidang teknik, teknologi, dan ilmu kesehatan. “Sebuah bidang di mana kita menciptakan solusi berbasis teknik dan teknologi untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan,” kata lulusan program S1 Teknik Informatika di Institut Teknologi Telkom (ITT) itu menjelaskan *biomedical engineering*.

Menurut Dody, saat ini kita berada pada masa transisi dari era teknologi komunikasi menuju era teknologi kesehatan yang menjadi domain bidang *biomedical engineering*. Bidang ini adalah bidang masa depan yang sangat penting.

“Indonesia harus mulai melakukan transformasi juga agar bisa bersaing di bidang ini,” ujar dosen muda di ITT tersebut.

Perkenalan Dody dengan bidang *biomedical engineering* bermula dari sebuah ketidaksengajaan. “Ketika lulus SMA, saya ingin sekali menjadi dokter. Namun saya memiliki kelemahan mendasar, yaitu buta warna, sehingga harus mengubur dalam-dalam impian itu,” kata Dody. Selama empat tahun berikutnya, dia pun akhirnya belajar teknik informatika.

Pada awalnya Dody mengaku sangat tidak menyukai bidang informatika, bahkan cenderung membencinya. Waktu lah yang mengantarkannya pada kesadaran bahwa bidang informatika sangat menarik dan terkait dengan banyak disiplin ilmu, termasuk kedokteran. Pada 2008, Dody memadukan bidang teknologi informatika dan kesehatan melalui temuan pertamanya. “Saya membuat alat pendeteksi penyakit jantung pada 2008. Tahun berikutnya saya menemukan alat pendeteksi gizi buruk,” ujar Dody.

Tantangan buta warna kembali menghadang ketika Dody lulus kuliah. Dia kesulitan mencari pekerjaan dan ditolak banyak perusahaan karena alasan itu. Pada akhir 2009, Dody bertekad menemukan solusi atas kendala yang dihadapinya. “Ada yang salah dengan tes buta warna yang



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpd@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

digunakan saat ini. Ketika seorang rabun jauh punya satuan plus minus, orang buta warna tidak memiliki satuan pasti untuk keparahan tingkat buta warna mereka,” katanya. Merasa mengalami diskriminasi, Dody melakukan mengembangkan penelitian tentang tes buta warna.

Hasil tes ini diharapkan bisa mengeluarkan satuan keparahan mata manusia dalam membedakan warna. Dengan tes ini, setiap orang dapat mengetahui secara detail warna apa yang bisa dan tidak bisa dilihatnya. Penelitian lulusan program magister Jurusan Biomedical Engineering ITB itu sudah memasuki fase terakhir, yaitu pengujian kepada manusia. Mimpinya, hasil penelitian itu bisa merevolusi tes yang ada sekarang.

Prestasi berkesan

Dengan predikat sebagai Peneliti Transportasi Terbaik yang diterimanya akhir Oktober lalu, Dody diganjar dengan penghargaan Adi Cipta Tata Wahana Nusantara Award dari Menteri Perhubungan, uang tunai Rp50 juta, dan *educational trip* ke Australia. Dody meraih penghargaan tersebut setelah melakukan penelitian di bidang keselamatan transportasi. Dia menemukan *Brainstat*, sebuah sistem pencegah kecelakaan transportasi dari otak manusia. “Saya menciptakan alat dan sistem di mana seorang pengendara moda transportasi



Dody Qori Utama menerima penghargaan Adi Cipta Tata Wahana Nusantara Award dari Menteri Perhubungan akhir Oktober lalu.

Foto Dok. pribadi

dipantau alat berbentuk sejenis *headband*. Alat ini menangkap sinyal otak manusia dan memantau *human error*-nya,” kata Dody. Ketika sang pengendara terindikasi tidak layak mengemudi karena *human error*, maka alat ini akan memberikan *warning*.

Inti dari temuan Dody adalah keterkaitan antara fungsi otak dengan kecelakaan transportasi, termasuk kecelakaan di transportasi udara. Dengan *Brainstat*, kita dapat mengetahui apakah pengemudi, nakhoda, pilot, masinis, dan pekerja transportasi lainnya sedang kelelahan, mengantuk, stres, dan mengalami kondisi-kondisi kejiwaan yang memengaruhi aspek keselamatan bertransportasi. Dody telah banyak menghasilkan temuan dan prestasi. Selain *Brainstat*, dia juga pernah mengharumkan bangsa di luar negeri, contohnya saat bersama timnya berhasil menjadi juara *University Mobile Contest Mobile World Congress 2015* di Barcelona, Spanyol. Saat itu Dody mengikuti kompetisi *mobile* terbesar dan berhasil mengalahkan peserta dari kampus-kampus terbaik dunia seperti Massachusetts Institute of Technology; Universitas California, Berkeley; dan National University of Tecnology Singapore.

Namun di antara berbagai prestasi dan temuan, yang paling berkesan bagi Dody adalah ketika sistem pemetaan obat yang dikembangkannya dipakai di banyak tempat dan bisa menyelamatkan nyawa manusia akibat krisis obat. Sistem pemetaan tersebut dirancang Dody bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Kementerian Kesehatan. Sistem ini sudah berjalan setengah tahun di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. “Sistem ini dapat mencegah kelangkaan stok obat di fasilitas kesehatan di seluruh tempat yang menggunakannya, termasuk daerah terpencil,” ujar Dody.

Dody tak ingin berhenti menorehkan prestasi dan temuan. Di tengah berbagai aktivitasnya, dia sedang membangun sebuah solusi *smarthome* atau rumah pintar yang bisa memahami keinginan pengguna secara otomatis. Dia juga tengah menjalin kolaborasi bersama Gerakan Nasional Pengawas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membuat platform digital fatwa-fatwa MUI, sehingga mudah dipantau dan diawasi pemanfaatannya.

Sumbangsih

Dody adalah anak muda dengan banyak mimpi. Dia mendaftar beasiswa LPDP karena merasa beasiswa ini ditujukan untuk generasi yang mempunyai impian dan cita-cita besar untuk negeri, khususnya di bidang teknologi kesehatan. “Di antaranya saya ingin mengubah sistem tes buta warna, menurunkan tingkat kecelakaan transportasi, dan meningkatkan penggunaan terkait teknologi kesehatan seperti sistem pemetaan obat yang saya kerjakan,” kata Dody.

Dody menaruh harapan besar terhadap pemerintah agar karya anak bangsa mendapatkan dukungan untuk digunakan di banyak tempat di negeri ini. “Saat ini kami para inovator masih mengalami masalah besar di mana sistem atau temuan kami belum dipercaya dan diterima karena kita terlalu percaya pada karya orang luar. Harapan saya sangat *simple*, yaitu agar kita semua percaya pada inovasi anak negeri ini,” ujar pemuda yang bermimpi untuk memenangkan hadiah Nobel itu.

Teks Dwinanda Ardhi

Akuntabilitas dalam Penatausahaan Barang Milik Negara

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara



Foto
Dok. Biro KLI

Demi mewujudkan tertib administrasi Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, serta menyikapi perkembangan pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan mengganti ketentuan penatausahaan BMN yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 (PMK 120) dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 (PMK 181). Penatausahaan BMN penting untuk dilakukan agar semua BMN terdaftar dan tercatat dengan baik menurut penggolongan dan kodefikasi barang, dapat diketahui jumlah, nilai, dan kondisi yang sebenarnya, serta dapat dilaporkan dan disajikan secara akurat.

Pembaruan aturan juga bertujuan untuk mengharmonisasikan ketentuan mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat dengan beberapa norma yang sebelumnya diatur dalam PMK 120, tetapi kini telah memiliki aturan tersendiri. Khususnya mengenai penggolongan dan kodefikasi BMN, tata cara pengelolaan

BMN *idle*, perencanaan kebutuhan BMN, dan penyusutan BMN berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat beserta aturan pelaksanaannya.

Beberapa aturan yang diperbarui antara lain terkait penyesuaian istilah/definisi, penggolongan objek penatausahaan BMN yang lebih rinci, pengecualian pengaturan penatausahaan BMN tertentu, serta kapitalisasi dan penyusutan BMN. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai daftar barang hilang/barang rusak berat, serta BMN berupa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Namun, format laporan dalam PMK 181 dibuat lebih sederhana, baik pada jumlah maupun jenisnya.

Penatausahaan: Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan

Penatausahaan BMN meliputi alur proses pembukuan, inventarisasi aset dan pelaporan. Objek penatausahaan BMN dalam PMK 181 tidak hanya terbatas pada barang yang dibeli dan diperoleh

dengan menggunakan APBN, seperti yang ditentukan dalam PMK 120, tetapi juga BMN yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pencatatannya, penggolongan objek penatausahaan BMN dirinci lebih lanjut berdasarkan sudut pandang neraca/akuntansi dan dicatat sebagai akun persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset lain-lain. Hal lain dalam ketentuan PMK 181 adalah terdapat pengecualian terkait pengaturan penatausahaan BMN tertentu apabila telah diatur dalam PMK atau peraturan lain. Diantaranya penatausahaan BMN atas BMN yang berasal dari aset KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) migas, aset

kontraktor PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), dan pada pengelola barang yang berasal dari aset eks Pertamina.

Pembukuan Berjenjang

Dalam kegiatan pembukuan PMK 181, daftar BMN per K/L pada Pengelola Barang memuat seluruh BMN akan tetapi penyajiannya berbeda pada setiap jenjangnya. Mulai dari KPKNL, Kanwil DJKN, sampai kantor Pusat DJKN. Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah (DBMN-KD) yang dicatat KPKNL memuat seluruh data BMN. Selanjutnya, Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah (BMN-KW) yang dicatat Kanwil DJKN memuat seluruh data BMN dengan penyajian terbatas pada tanah, gedung dan bangunan, bangunan air, serta peralatan dan mesin yang memiliki Kartu Identitas Barang (KIB). Sementara itu, kantor pusat DJKN mencatat Daftar Barang Milik Negara (DBMN) yang memuat seluruh data BMN dengan penyajian terbatas pada tanah, gedung

dan bangunan, serta alat angkutan.

Perlu Inventarisasi

Agar laporan menggambarkan nilai BMN yang sebenarnya, diperlukan inventarisasi BMN secara berkala. Berdasarkan ketentuan Pasal 18, opname fisik perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, khususnya untuk BMN yang berwujud persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Ketentuan tersebut juga mengatur perlunya dilakukan sensus barang, sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, khususnya untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. Inventarisasi tidak perlu dilakukan untuk BMN yang berwujud persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dan tidak berada dalam penguasaan, serta belum ada persetujuan pemindahtanganan.

Laporan dan Sanksi

Laporan penatausahaan BMN wajib disusun setiap semester beserta

mutasinya secara berjenjang. Selain posisi dan mutasi, kewajiban pelaporan juga berlaku apabila terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pelaksanaan pengelolaan BMN. Sesuai ketentuan dalam PMK 181, format, daftar, buku, serta laporan dibuat lebih sederhana, baik dari jumlah maupun jenisnya, serta harus disesuaikan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan lainnya. Jumlah laporan yang wajib disampaikan dibagi per jenjang, mulai dari 16 format hingga 40 format. Sementara dalam aturan sebelumnya, laporan dibuat dalam 36 hingga 62 format.

Dalam PMK 181, sanksi diberikan apabila aturan mengenai pendaftaran BMN, pemutakhiran dan rekonsiliasi, hingga pelaporan BMN tidak ditaati. Sanksi yang diberikan berupa penolakan usulan pemanfaatan, pemindahtanganan atau penghapusan BMN, surat peringatan, dan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Penutup

Aturan penatausahaan BMN dibuat dengan menjunjung asas transparansi dan penyesuaian terhadap aturan yang terkait dengan sistem akuntansi pemerintah pusat. Hal tersebut tergambar dari adanya pencatatan BMN, inventarisasi untuk menilai BMN, dan adanya aturan perubahan atau koreksi atas nilai aset, baik karena pengurangan kuantitas, pengembangan nilai aset, maupun koreksi perubahan kondisi. Prosedur penyampaian laporan juga dibuat lebih sederhana. Hal tersebut sebagai wujud akuntabilitas dari penggunaan BMN yang berasal dari APBN maupun sumber lain.

Teks Budi Sulistyono



Kearifan untuk Memahami Sebuah Kesuksesan

Foto
Zakky Yoga

Pada tiap pergantian tahun, setiap kita memiliki beragam pengharapan. Salah satu yang paling banyak diminta, boleh jadi, agar di tahun mendatang Tuhan memberi kemudahan rezeki dan peningkatan materi. Sebab masih banyak diantara kita yang mengukur kesuksesan hidup, lewat besarnya materi yang kita peroleh.

Pada hakikatnya, rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk memelihara kehidupan. Oleh karenanya, rezeki yang digunakan sudah sepatutnya merupakan rezeki yang halal dan diperoleh dengan cara yang benar. Dengan demikian, kehidupan dapat terpelihara dengan baik.

Segala sesuatu di dunia ini, termasuk dalam urusan menjemput rezeki, memang tidak selalu mudah untuk diperoleh. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, sebab kendala dan kegagalan datang silih berganti. Sayangnya, manusia seringkali terburu dalam menjemput rezekinya. Naluri diabaikan. Gaya hedonisme pun tidak terelakkan. Akhirnya, berbagai cara yang salah dipersiapkan dengan apik sebagai jalan pintas, demi memenuhi kehendaknya.

Bagaimanapun bagusya rencana yang dibuat, jika berpangkal pada kecurangan dan keserakahan, tidak akan bermuara pada kebahagiaan. Gantinya pasti, ada cercaan dan mu mungkin nestapa yang bukan hanya ditanggung oleh diri sendiri. Melainkan juga kerabat, teman, dan lingkungan yang turut merasakan akibatnya.

Hal yang perlu diingat, Tuhan memiliki kuasa atas umat-Nya. Untuk itu, manusia tidak bisa memaksakan kehendaknya atas apapun, termasuk urusan rezeki. Sepatutnya manusia

meyakini bahwa rezeki yang dijemput dengan kerja keras dan doa, semata-mata anugerah dari Tuhan. Kesabaran dalam kerja keras boleh jadi dianggap sebagai benih pahit, tetapi kelak siap dipanen di masa depan. Sabar dalam penantian dan doa menjadi cermin keimanan manusia kepada Yang Maha Memberi Kehidupan, bagaimanapun hasil akhirnya.

Bukan masalah berapa banyak yang diperoleh dari hasil kerja keras kita. Justru semakin banyak peluh yang menetes dan semakin banyak doa yang dilatunkan, itulah kelak yang akan dibayar penuh berupa rezeki yang berkah. Seandainya ditemui kegalalan, tentu merupakan kegagalan dalam kemuliaan dan itu lebih utama dibandingkan dengan sebuah keberhasilan dalam kehinaan.

Apapun dan seberapapun anugerah yang Tuhan berikan, sudah sepatutnya kita syukuri. Sebab materi bukan satu-satunya tolok ukur kesuksesan hidup. Di sinilah kearifan manusia diperlukan untuk memahami sebuah kesuksesan. Hingga materi tidak lagi membutuhkan.

Teks Titi Susanti



Judul:
Catatan Najwa
Pengarang:
Najwa Shihab
Penerbit:
Literati
Kota Terbit:
Tangerang Selatan
Tahun Terbit:
2016
Deskripsi Fisik:
208 halaman
ISBN:
9786028740586

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda 1 Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat

Perpustakaan
Kemenkeu

Perpustakaan
Kementerian
Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Milea : Suara Dari Dilan
Pidi Baiq
- 2 Bulan
Tere Liye
- 3 The Girl On the Train : Kau tak Mengenalnya, Tapi Dia Tahu Siapa Dirimu
Paula Hawkins
- 4 Indonesia Banget
Mice Cartoon
- 5 The Geography Of Bliss
Eric Weiner

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Human Resources Champions : The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results
Dave Ulrich
- 2 Advanced Grammar In Use
Martin Hewings
- 3 Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah
Prof. Boediono
- 4 Catatan Najwa
Najwa Shihab
- 5 Tax Amnesty Itu Mudah : Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak
Nufansa Wira Sakti

Catatan Najwa

Sedikit sekali menemukan tayangan di televisi yang menyuguhkan acara dan konten yang berkualitas. Tidak melulu persoalan mencari rating dan meraup banyak penonton di setiap tayangannya, akan tetapi dapat ikut mencerdaskan kualitas sosial para penonton televisi di Indonesia, seperti halnya program televisi Mata Najwa. Mata Najwa memberi warna baru di tengah banyaknya tayangan televisi yang massive dan memanjakan mata. Lewat Mata Najwa pula, negeri ini dapat melihat dengan jernih persoalan pelik para elite politik. Masyarakat bisa membedakan mana yang palsu mana yang asli, mana yang terlihat abu-abu mana yang tulus.

Selama tujuh tahun, program Mata Najwa tidak sepenuhnya menghadirkan soal muram durja politik Indonesia. Mata Najwa seringkali mengangkat kisah orang-orang hebat yang berkontribusi besar namun jauh dari sorotan popularitas. Seluruh rangkaian tugas jurnalisme tim Mata Najwa berdedikasi untuk mengakomodasi suara-suara kecil yang jauh dari pusat panggung. Mata Najwa seolah menggarisbawahi bahwa republik ini memang dimiliki oleh segenap masyarakat dan masyarakat akan bekerja dengan caranya sendiri untuk mempertahankan nilai-nilai dasar republik ini.

Salah satu televisi talkshow berpengaruh di Indonesia ini telah menjelma menjadi sebuah buku berjudul

Catatan Najwa. Narasi dalam buku ini dituturkan hadir serupa dengan puisi, tersusun rapi dari kata-kata yang memiliki keterikatan bunyi yang serasi. Dengan menggunakan modus puisi, premis-premis dalam narasi terumuskan dengan jelas dan tegas. Catatan Najwa ini dipersatukan dan digerakkan oleh kegelisahan dan mimpi tentang Indonesia. Peraih berbagai penghargaan jurnalistik dari dalam dan luar negeri, serta Duta Baca Perpustakaan Nasional Indonesia (2016 – 2020) ini menuliskan tiap bait dengan gaya rima yang khas, menggelitik dengan sindiran, menohok tajam, kadang seperti ajakan merenung. Seperti salah satu kutipan dalam bab di buku ini “Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi”.

Uniknya, pada setiap pergantian topik atau bab dalam buku ini selalu diselengi narasi atau kutipan serta foto close up penulis yang menginspirasi dan terhubung dengan bab selanjutnya. Dominasi warna merah pada buku mewakili sosok jurnalis yang tegas dan lugas saat tampil di layar kaca. Buku ini sarat akan makna apabila kita menyelami perlahan setiap narasi. Pembaca pun akan membayangkan sosok Najwa Shihab seperti di layar kaca. Inilah narasi-narasi terbaik Mata Najwa yang akan terus relevan dibaca kapan pun.

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Sianjur Mula Mula, Tanah Asal Suku Batak

Perjalanan ini berawal dari sebuah buku karya Dewi Lestari yang berjudul Gelombang. Buku keempat dari serial Supernova ini mengisahkan petualangan hidup Alfa Sagala, seorang pemuda Batak yang lahir dan tumbuh di Sianjur Mula Mula. Pedesaan di tepi Danau Toba ini dipercaya sebagai tempat asal leluhur suku Batak.

Malam itu Bandara Kualanamu mulai sepi. Penumpang yang datang dari berbagai kota berangsur meninggalkan bandara. Saya berulang kali memeriksa gawai, memastikan sahabat yang akan menjemput tidak salah jadwal. Menjelang tengah malam, akhirnya sahabat saya itu datang juga. Tanpa buang waktu kami segera meluncur membelah Medan menuju Kabupaten Samosir.

Setelah menempuh perjalanan semalaman, kami tiba di Menara Tele sesaat sebelum fajar. Menara ini adalah gardu pandang yang berada di lereng perbukitan. Dari atas menara kita bisa menikmati panorama spektakuler Danau Toba dan sekitarnya. Dari lantai tiga menara saya menyaksikan matahari terbit perlahan dari balik perbukitan yang memagari danau.

Pagi semakin terang. Nun jauh di bawah tampak samar rumah-rumah berkelompok dikelilingi persawahan. Halimun melayang rendah, memunculkan kesan magis dan misterius. “Ayo kita ke desa, sebelum kabut mulai menguap”, ajak teman saya. Setelah satu jam menuruni jalanan curam di punggung bukit, sampailah kami di gerbang masuk Sianjur Mula-Mula.

Terdapat beberapa *huta* atau kampung di Sianjur Mula-Mula. Setiap *huta* terdiri dari rumah-rumah *bolon*, yaitu rumah panggung khas adat Batak dengan atap melengkung di bagian depan dan belakang. Letak antara satu *huta* dengan *huta* lainnya saling berjauhan, terpisahkan oleh petak-petak sawah dan perbukitan.

Sianjur Mula Mula memiliki nilai historis bagi masyarakat Batak. Berdasarkan sejarah lisan Toba, desa ini merupakan pemukiman pertama yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Beberapa tradisi nenek moyang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah berziarah ke Pusuk Buhit untuk mengunjungi situs-situs penting leluhur.

Menurut catatan Sitor Situmorang, sastrawan kenamaan Indonesia, Pusuk Buhit adalah tempat dewa tertinggi, Mulajadi Na Bolon, turun ke bumi. Sebab itu, gunung ini juga menjadi pusat religi Batak Toba. Alkisah, di puncak Pusuk Buhit inilah manusia Batak pertama berelasi dengan penghuni ‘dunia atas’ hingga mereka turun ke lembah Sianjur Mula Mula.

Ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi saat berada di Sianjur Mula Mula, salah satunya adalah Aek Sipitu Dai yang artinya air tujuh rasa. Sesuai namanya, di sini terdapat tujuh mata air dengan rasa yang berbeda, seperti masam dan rasa soda. Konon, Aek Sipitu Dai adalah tempat pemandian raja-raja Batak dan keturunannya. Saya juga berkunjung ke Monumen Patung Si Raja Batak yang berada di puncak salah satu bukit. Dalam bahasa setempat, monumen ini diberi nama Sopo Guru Tetea Bulan. Di monumen ini terdapat diorama yang menjelaskan silsilah raja-raja Batak.

Udara sejuk dan hijaunya perbukitan di sekeliling Sianjur Mula Mula memunculkan rasa damai. Di antara celah-celah tebing, tampak air terjun mengalir deras. Warga melakukan aktivitas kesehariannya seperti bertani dan beternak. Rasa penasaran tentang kampung halaman Alfa Sagala ini mulai terjawab. Tak hanya berimajinasi setelah membaca novel Gelombang, kini saya bisa merasakan langsung keindahan Sianjur Mula Mula.

Teks dan Foto Adhi Kurniawan



Foto
Anas Nur Huda

Karier dan Musik Saling Mengisi

Cukup lama menghilang dari industri musik tanah air, nama Fryda Lucyana Kurniawan nyaris tenggelam dengan hingar bingarnya perkembangan musik yang kian beragam. Ternyata hingga kini, Fryda masih tercatat sebagai Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi (DDI) Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara.

Sebagai Asisten Deputi DDI, wanita kelahiran Semarang, 17 Desember ini bergelut di bidang kehumasan. Tugasnya tidak hanya menganalisa strategi kehumasan semata, tetapi juga turun ke lapangan menangani hubungan dengan para wartawan istana.

Ketika berbicara mengenai kehumasan pemerintah, wanita yang era 90-an dikenal sebagai pelantun hits 'Rindu' ini menegaskan pentingnya mendengar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi masyarakat yang majemuk mengharuskan pemerintah untuk merangkul publik.

"Perlu sinergi banyak pihak menciptakan *public relation* yang baik. *Relationship* itu penting, bagaimana menjaga hubungan baik dengan publik. Dua pihak harus saling menjaga supaya langgeng, saling *understanding*. Kalau *understanding* (saling pengertian) sudah terbentuk kita harapkan masyarakat lebih banyak mengerti. Akhirnya berpartisipasi karena peran serta masyarakat kita butuhkan," jelas Fryda.

Setelah sekitar 15 tahun bekerja sebagai abdi negara, Fryda memutuskan rehat sejenak. Dengan mengambil cuti di luar tanggungan negara, Sarjana hukum universitas Airalngga ini mendampingi suaminya bertugas di luar kota sambil menjalani program kehamilan.

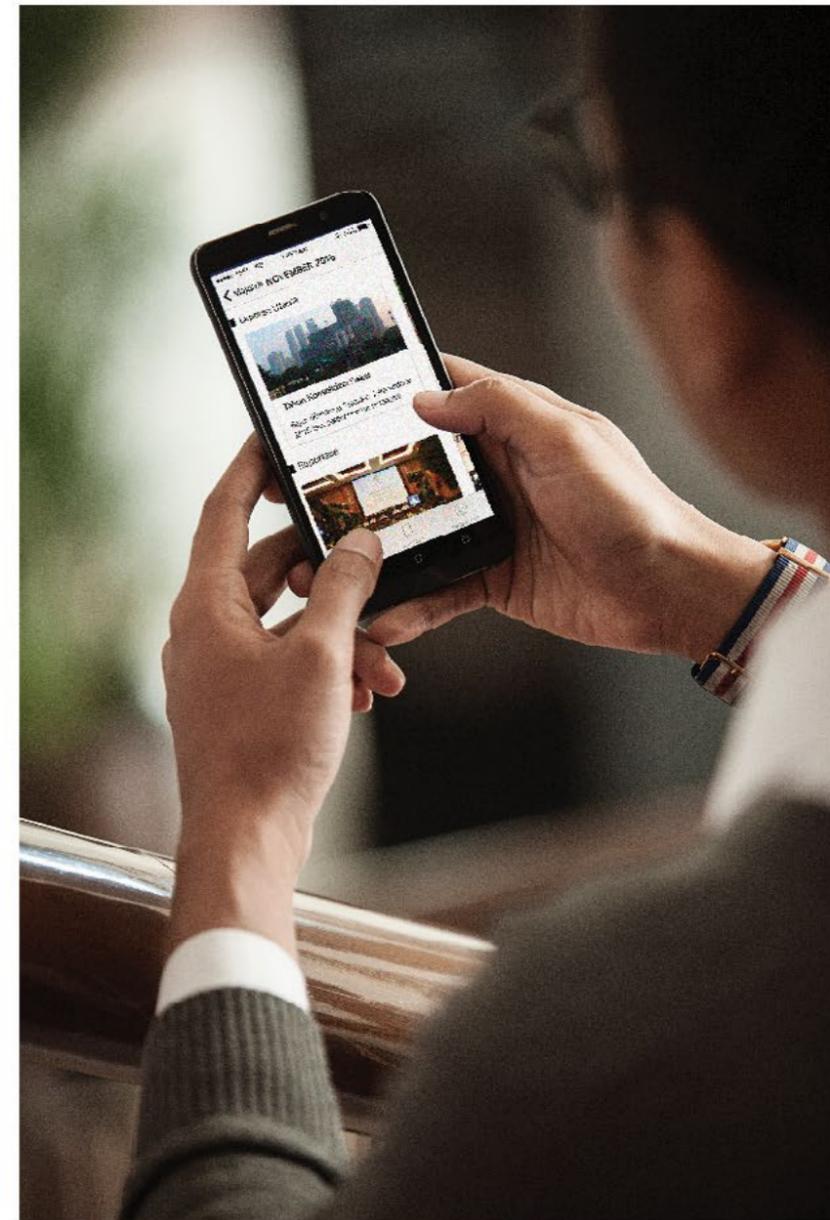
Ditengah masa cuti panjangnya, Fryda memutuskan kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya. "Passion saya di dunia musik. Bukan mengabaikan latar belakang ilmu yang sudah saya perjuangkan sampai lulus beasiswa AUSAID. Sebaliknya, itu menyeimbangkan

hidup saya bahwa dunia karier dan musik saling mengisi satu sama lain," katanya.

Terbukti beberapa waktu lalu, Fryda, terlibat dalam pembuatan album garapan Eros Djarot yang bertajuk 'Nabiku Cintaku'. Meskipun kerja sama dengan maestro musik kawakan ini bukan kali pertama dilakukan olehnya, tetapi penggarapan proyek tersebut menjadi album ber-*genre* religi yang pertama bagi keduanya.

Satu hal yang ia tekankan sebagai prinsip hidupnya ialah *say no to bajakan* dan *say no to drugs*. Lulusan Magister Hukum University of Melbourne, Australia ini menekankan urgensi untuk menghargai karya orang lain, utamanya karya seni seseorang. Untuk itulah, Fryda mengajak seluruh masyarakat agar tidak membeli album bajakan sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta seniman serta tidak mengkonsumsi narkoba karena bisa merusak generasi bangsa.

Teks lin Kurniati



Akses isu-isu ekonomi hanya dengan sekali tap.

Install aplikasi Majalah Media Keuangan pada perangkat Anda.



MAJALAH MEDIA KEUANGAN





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MENUJU INDONESIA MAJU, SELAMAT TAHUN BARU 2017

Tol Trans Sumatera
Interchange Binjai
STA 15+000